

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Data

Penelitian ini mendeskripsikan tentang bentuk retorika dan fungsi retorika antara lain : tuturan retorika politisi pada acara Rosi di Kompas TV yang dipublikasikan dalam jejaring media sosial *youtube*. Penelitian ini juga menjelaskan bentuk retorika: retorika deliberatif, retorika demonstratif, retorika forensic, fungsi retorika antara lain : retorika sebagai komunikasi persuasif, retorika sebagai penghubung kewenangan tertinggi, retorika sebagai pengumpulan data yang akurat, retorika sebagai ilmu pengetahuan, retorika sebagai pondasi pembangunan masyarakat. Data penelitian ini diambil selama bulan April dan Mei 2019.

Berikut adalah data yang berupa video ujaran retorika bahasa politisi pendukung capres dan cawapres 01 dan 02 dan pendukung yang bersifat netral yang akan diteliti sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Daftar Video Acara Rosi yang akan diteliti:**

No	Judul video	Waktu upload
1	Politik pasca pemilu	25 april 2019
2	Menunggu hasil pemilu	02 mei 2019
3	Pemilu menelan nyawa	09 mei 2019

Berikut ini adalah kodifikasi data beserta keterangannya :

**Tabel 4.2 Daftar Kodifikasi Beserta Keterangan**

No	Kode	Keterangan
1	Deli	Bentuk Retorika Deliberatif
2	Demon	Bentuk Retorika Demonstratif
3	Foren	Bentuk Retorika Forensic
4	Komper	Fungsi Retorika Sebagai Komunikasi Persuasif

5	Pengkes	Fungsi Retorika Sebagai Penghubung Kekuasaan Tertinggi
6	Pengdat	Fungsi Retorika Sebagai Pengumpulan Data yang Akurat
7	Ipeng	Fungsi Retorika Sebagai Ilmu Pengetahuan
8	Ponpem	Fungsi Retorika Sebagai Pondasi Pembangunan Masyarakat
9	Ppp	Politik pasca pemilu (Judul Video)
10	Mhp	Menunggu hasil pemilu (Judul Video)
11	Pmn	Pemilu menelan nyawa (Judul Video)
12	Rsi	Rosianna Silalahi (Moderator)
13	Ysf	Yusuf Muhammad Martak (Narasumber pendukung 02)
14	Tgb	Tuan Guru Bajang (Narasumber pendukung 01)
15	Mqd	M. Qodari (Narasumber survey Indo Barometer)
16	Lkn	Lukman Edy (Narasumber pendukung 01)
17	Ss	Sudirman Said (Narasumber pendukung 02)
18	Arf	Arief Budiman (Narasumber ketua KPU)
19	Egl	Effendy Gozali (Narasumber uji UU Pemilu )
20	01:00	Durasi Waktu
21	01, 02, 03, dst	Kode Urut Data

Cara Penulisan Kode :

Jenis bentuk retorika/Jenis fungsi retorika /judul video/Durasi.

Berikut adalah tuturan para tokoh olitik di acara Rosi di Kompas TV  
**Tabel 4.3 Daftar Tuturan Bentuk Retorika Demonstratif Politisi Pada Acara Rosi Di Kompas TV**

No	Retorika Demonstratif	Koding
1	(Lkn)” Iya, saya ingin meluruskan terlebih dahulu, terminologi ITSM kalau didalam Undang–undang no 7 tahun 2017 dan didalam PKPU itu adalah politik uang yang terskturktur, sistematis dan masif iya, nah kalau dalam terminologi Mahkamah Konstitusi saya kira juga eh apa namanya kan kalau yang diadili di Mahkamah Konstitusi itu hasil dari pemilu, jadi berapa persen dianggap kecurangan, signifikan tidak untuk merubah suara seorang calon baru kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan punya legal stending untuk mengadili sebuah tuntutan terhadap eh hasil dari sebuah pemilu.	Demon/Pengkes/Ppp/05:25-07:50
2	(Lkn)” Kalau pun ada tuduhan pengerahan masa, pengerahan kekuatan bahkan pengerahan duwit dalam rangka untuk memenangkan pak Jokowi, menurut saya itu bagian dari tuduhan yang tidak mempunyai data dan fakta iya, ini harus dibuktikan enggak bisa kemudian kita cuap-cuap di tengah publik mengatakan ini ada kecurangan sementara tidak punya bukti untuk diadakan kepada BAWASLU.	Demon/Pengkes/Ppp/08:09-09:07
3	(Ss)”Mangkannya ,posisi kitta tidak menghakimi tapi ingin bertanya terus misalnya apakah betul? tidak ada pengerahan aparat BUMN, apakah betul tidak ada mobilisasi acara–acara yang melibatkan perusahaan–perusahaan negara, apakah betul tidak ada pengerahan polisi–	Demon/Pengkes/Ppp/11:22-12:10

	<p>polisi gitu? apakah betul tidak ada pengerahan aparat desa? di Jawa Tengah, di Jawa Tengah 31 orang kepala daerah dikumpulkan oleh Gubernur, dan oleh BAWASLU dikatakan itu sebagai pelanggaran ketidak netralan tapi kemudian oleh mendagri dikatakan sans kami akan lindungi.</p>	
4	<p>(Ss)'' Sebetulnya sih saya ingin mengoreksi yang dikatakan bung Arya tadi sebetulnya proses itu terjadi , pelaporan terjadi 2 pekan lalu terus minggu lalu kita menyampaikan laporan 1.200 pelanggaran atau kecurangan itu sdah disampaikan dan kita juga bersiet kepada BAWASLU misalnya kejadian ini Malaysia langsung difolapikan dihentikan kemudian diminta pemilu ulang segala macem, Surabaya diminta hitung ulang jadi cukup responsiflah dan diberbagai spot itu yang kemudian kita melihatnya ini bisa jadi apa masif karena diseantero negeri ada kejadian itu.</p>	<p>Demon/Pengkes/Ppp/18:43-20:32</p>
5	<p>(Arf)''Iya, saya pikir apa yang disampaikan bang Said tadi sama dengan yang disampaikan oleh para sekjen tadi ketika datang ke KPU dan saya jelaskan semuanya dengan detail, misalnya tuduhan tentang eh salah input itu curang dan masif, tidak apa yang indikatornya masif, sampai hari ini sudah 2000, 200 eh 255.000 lebih data terinput, kesalahan yang kami catat iya, itu 105 laporan dari masyarakat hanya 27, selebihnya sebetulnya berdasarkan temuan kita.</p>	<p>Demon/Pengkas/Ppp/29:15-30:39</p>
6	<p>(Arf)'' Iya kalau KPU kemudian mengupload yang mohon maaf ini iya, ini yang merugikan 01 nanti dikira kita dukung 01, kita mengupload yang merugikan 02 nanti dikira dukung 02 dan seterusnya.</p>	<p>Demon/Pengkas/Ppp/30:46-31:51</p>

	Mangkanya KPU enggak mengupload itu tetapi memberikan penjelasan setiap ada yang salah entry kami tampilkan ini yang sudah dibetulkan dan seterusnya, kemudian tuduhan ini kok enggak berubah-berubah gitu iya, kami memberikan jumlah akun yang sama kepada setiap Kabupaten Kota,	
7	(Arf)'' No, itu tidak mungkin bagi saya, saya agak, agak risau begini iya, kalau kami dituduh curang, masak curang itu kami pertontonkan, kami curang iya kan enggak mungkin gitu loh, semua eh pihak siapa pun peserta pemilu, masyarakat bisa melihat sendiri dan kalau ada eh kesalahan silahkan dilaporkan, KPU membuka kanal untuk pelaporan itu baik email, by phone , by WA eh silahkan dilaporkan dan kami akan melakukan eh koreksinya.	Demin/Pengkas/Ppp/32:07-33:10
8	(Ss)'' Saya ingin sedikit melebar iya karena sekali lagi tidak fer kalau kita mengedres seluruh keliruan atau kecurigaan kepada KPU, karena KPU itu kan pengelola mekanik dari proses itu, tapi environment atau lingkungan, suasana batin itu tercipta sebelum memulai gitu, jadi level trasnya begitu rendah sehingga apapun yang muncul kemudian dicurigai secara berlebihan, mungkin berlebihan karena itu posisi kami ini posisi kami, kami menyambut baik usulan-usulan dari tokoh-tokoh seperti saya ini nol, nol dua ya.	Demon/Pengkas/Ppp/33:31-34:05
9	(Ss)'' Itu tadi mangkanya level kepercayaan sudah begitu rendah, sehingga tadi sebelum mas Arief datang kita simpatis sepenuhnya kepada luar biasa bebannya gitu, sudahlah multi partai, proposonal tertutup eh terbuka, kemudian eh serentak itu jadi luar biasa, tapi	Demon/Ponpem/Ppp/34:14-35:02

	posisi kita begini posisi kita, kita mengapresiasi pada pandangan–pandangan sebagian masyarakat sipil, yang ada baiknya dibikinkan satu tim pencari fakta begitu, dan, kita akan dorong itu supaya kecurigaan tadi bisa ada diderogasi gitu.	
10	(Ss)” Kita enggak boleh, sorry,bang Arya tidak boleh melihat sebagai angka semata–mata gitu iya, jadi satu kesalahan bisa sangat fatal, mangka itu kemudian lebih baik ada pihak tengah yang kemudian mevedivikasi baik keberatan 01 maupun 02 gitu, jadi menurut saya sih ini bukan soal angka tapi soal banyak hal yang berinsipil yang mesti kita lihat gitu.	Demon/Ponpem/Pppm/37:16-37:37
11	(Ss)” Begini saya jelaskan misalnya gitu iya kalau dari 142 menjadi 1.402 yang tadi dikatakan, sebetulnya kalau input kontrolnya betul tidak akan bisa masuk, kalau ada basis bahwa barang siapa memasukkan angka lebih dari suara dari suara yang sah suara yang boleh maka akan tetap ditolak, ini kan tidak bablas gitu kan. Kalau itu terjadi kan orang bisa curiga, ini orang menambahkan angka didepan 1 atau dibelakang nol, diperintahkan secara struktur atau kreatifitas sendiri gitu.	Demon/Ilpeng/Ppp/38:10-38:43
12	(Arf)” Kalau bicara soal kepercayaan survey–survey yang kredibel masih menempatkan kepercayaan publik kepada KPU diangka 83%, publik masih percaya sama KPU	Demon/Pengdat/Ppp/38:50-39:01
13	(Lkn)” Saya juga ingin menyatakan seperti itu, pak Sudirman menyatakan bahwa sekarang terbentuk publik tidak percaya	Demon/Ponpem/Ppp/39:09-39:52

	KPU itu darimana iya? apa lagi berita soal atau membangun frame ketidakpercayaan kepada KPU itu kan sudah jauh-jauh hari sebelum hari H, sebelum masa kampanye sudah dibangun ketidakpercayaan, kita masa kampanye menyatakan DPT bermasalah dan lain sebagainya.	
14	(Lkn)"Narasi seperti itu sudah sering dibuat oleh 02. Pada akhirnya kan masyarakat gak percaya juga kepada narasi-narasi postur bicara,	Demon/Ilpeng/Ppp/49:38-50:01
15	(Arf)" Iya, kami memberikan apa aller gitu iya kalau memang misalnya $5 + 10 = 15$ tapi dia tulis 20, itu kami langsung berikan warna merah iya, dia harus lakukan koreksi, nah disini mungkin temen-temen apa namanya operator yang menginput data, dia belum melakukan koreksi tapi langsung klik ok sehingga dia masuk gitu loh,tetapi proses melakukan koreksi itu bukan hanya terjadi di sistem IT, secara manual yang dilakukan rekap berjenjang itu bisa dilakukan koreksi.	Demon/Ponpem/Ppp/54:33-55:54
16	(Arf)" Saya ingin menjelaskan kepada publik, enggak kalau bertanya sesuatu yang tidak tepat kami punya kanalnya, jadi silahkan saja dikirim di email kita, dikirim ke WhatsApp kita, melalui telepon kita, jadi maksud saya sampaikan , kepada KPU, jangan kemudian apa namanya seolah-olah bertanya, jangan diviralkan dulu. Kami tentu berterima kasih iya kepada masyarakat, kepada siapa pun yang memberikan informasi kepada kami bahwa sesuatu yang salah.	Demon/Pengkas/Ppp/57:15-57:42

17	<p>(Ss)” Saya ingin memberi warning kepada teman–teman 01, jangan sampe kata–kata begini makin membuat rakyat sakit hati loh, karena gini, karena gini treatment.</p> <p>(Ss)”Treatment kepada masyarakat itu kan di komandoi oleh 1 struktur, apakah polisi? apakah kepala desa segala macam tapi responnya kan masing–masing karena mereka tidak dikomandani, dan dengan itu mereka share berbagai informasi iya, jadi jangan terlalu gegabah, merendahkan seolah–olah masyarakat itu bodoh gitu, mereka bi bisa marah makin marah dan pahamiilah.</p>	Demon/Ponpem/Ppp/59:53-1:00:19
18	<p>(Lkn)” Justru sekarang ini masyarakat kita sudah sangat cerdas, bagaimana mengikuti pemilu saja latihan masyarakat itu berkali–kali, ikut pilkada berkali–kali iya, sehingga masyarakat itu sudah cerdas, saya melihat di TPS itu masyarakat sudah bisa memilih–milih presidennya siapa dia pilih? Calegnya siapa dia pilih? iya enggak bisa kemudian eh apa teori kutil effect itu enggak berlaku kayaknya di Indonesia iya, karena masyarakatnya lebih cerdas.</p>	Demon/Ponpem/Ppp/1:02:32-1:03:40
19	<p>(Ss)”Saya kira attitude dari yang sedang berkompetisi pasti akan maksimal mengatakan saya menang, saya menang sampai kemudian ada keputusan yang bisa diterima oleh keduanya lah, jadi itu anggap sebagai ekspresi dari semangat juanglah gitu, tapi memang kita harus menangkap suasana hati itu tidak boleh ignored, tidak boleh diabaikan,karena apa saya ingin memberi contoh yang sangat mungkin agak sensitif, saya katakan hey disini dikompleks</p>	Demon/Ponpem/Ppp/1:13:17-1:14:51

	<p>paspamres, pak presiden kalah itu refleksi suasana hati yang betul–betul mesti ditangkap.</p> <p>(Ss)”Iya, orang yang paling dekat saja tidak memilih gitu, nah seluruh sumatera itu kalah pak presiden itu. Presiden Jokowi, kecuali Bangka Belitung.</p> <p>(Ss)”Iya, tapi Jawa itu menjadi tanda tanya yang besar kenapa dua Provinsi begitu tajam perbedaannya, jadi sebetulnya keinginan berubah itu merata dimana–mana.</p>	
20	<p>(Ss)” Saya kira yang kita wakili suasana hati masyarakat tadi iya, suasana salah satu yang membuat kita itu begitu di terima dimana–mana karena kita ingin mengatakan ingin menyelesaikan satu masalah besar keadilan, suasana keadilan itu dan itu yang menurut saya mau diakui atau tidak itu dirasakan.</p>	Demon/Ponpem/Ppp/1:16:45-1:17:05
21	<p>(Lkn)” Saya kira selama proses yang sudah berlangsung berbulan-bulan ini, itu kan pada akhirnya kita sepakat, rakyat yang menentukan pilihannya bukan saja menentukan pilihan siapa yang dia dukung tetapi juga rakyat bisa menentukan pilihannya mana informasi–informasi yang dia percaya, mana informasi–informasi yang tidak percaya iya.</p>	Demon/Ponpem/Ppp/1:17:09-1:18:43
22	<p>(Ysf)“Sebetulnya Istim’a Ulama yang ketiga ini sebetulnya tidak perlu di gelar, tapi karena kita melihat fenomena</p>	Demon/Ponpem/Mhp/02:05-02:52

	<p>banyaknya kejanggalan–kejanggalan dan kejadian di Pilpres 2019 yang di mulai pada tanggal 17 April 2019, di situlah mulai terlihat keresahan–keresahan masyarakat yang informasi–informasinya sampai kepada kami, kepada keumatan–keumatan yang bersama kami, pendukung paslon nomer 2 dan berita–berita baik di youtube , di video, yang viral dimana–mana tentang kecurangan yang secara terstruktur sistematis dan masif.</p>	
23	<p>(Ysf)“Kalau diserahkan kepada BPN berarti mereka masih–masih tidak terwadahi nanti, nah karena kami, saya khususnya dengan beberapa teman termasuk Ustadz Slamet Ma’arif, ketua persaudaraan alumni 212 dan ada beberapa tokoh lagi, itu semua terdaftar di BPN, jadi itulah mengambil 1 inisiatif agar masyarakat yang resah dengan kejadian–kejadian ini, mau mendengar pemaparan dari kita.</p>	<p>Demon/Ponpem/Mhp/03:34-04:05</p>
24	<p>(Tgb)“Kalau memang niatnya untuk menganalisis mestinya tercermin didalam rekomendasi yang disampaikan, jadi disitu dalam pandangan saya, mestinya ada hal–hal yang menyejukkan, hal–hal yang calm down yang menyebabkan kita ingat semua bahwa setelah konstentasi ini kita tetap harus bersatu sebagai satu bangsa.</p>	<p>Demon/Ponpem/Mhp/05:55-06:15</p>
25	<p>(Ysf)“Begini pertama saya mau memberikan pencerahan tolong jangan naif, kan Ulama yang berisim’a dengan kami kan satu, dua, dan tiga, jangan sekali–kali dikecilkan bahwa keulamaannya tidak kredibel, ada yang bilang abal–abal, ada yang bilang dianggap segala, saya mau</p>	<p>Demon/Ilpeng/Mhp/07:44-08.22</p>

	mengasih contoh begini, kalau ada satu ruangan disitu ada pelaku-pelaku melakukan kecurangan, pasti dia merasa aman, kami cctv, tolong dicatat semua perlakuan kecurangan datanya sudah ada dikami semua,	
26	(Ysf)“Tidak di GNPF, di BPN,dan GNPF juga kenapa di GNPF juga ada organisasi relawan yang namanya koppaSandi, disitu koppaSandi mempunyai data-data temuan yang banyak, disampaikan dihimbau agar ini ditindak tapi kasat mata kita tidak boleh membodohi rakyat, aparat ada situ dan melindungi, yang selanjutnya pembiaran ada pada para pemerintah, selaku presiden tidak pernah melakukan himbuan secara tegas, jangan ada kecurangan, hindari kecurangan harus jujur.	Demon/Ilpeng/Mhp/08:23-09.27
27	(Ysf)“Iya karena kita kontisional tidak melanggar hukum, tidak melanggar undang-undang, kita beristim’a, kita berkumpul, kita membicarakan, kalau tidak hadir di dalam Istim’a jangan menyikapi Istim’a dari luar, justru kami ini yang justru diberikan apresiasi bisa mereda kegelisahan masyarakat, baik masyarakat yang mana, tapi itulah yang kami sampaikan semuanya di dalam istim’a, yang alhamdulillah disepakati, mau meredam semuanya.	Demon/Ilpeng/Mhp/09:30-09:55
28	(Tgb)”Menurut saya perlu diklarifikasi iya antara misalnya yang paling banyak dibicarakan kan salah input, ternyata kedua belah pihak bermasalah artinya ada yang menguntungkan ini, ada yang menuntungkan itu, ada hal lain yang menyangkut indikasi kecurigaan, ketidak	Demon/Ilpeng/Mhp/12:27-12:51

	netralan aparat ya buktinya apa? kan semuanya pada akhirnya apa buktinya ?	
29	(Ysf)“Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Bajang, sebetulnya kan Istim’a itu merekomendasi kepada BPN untuk mendatangi KPU sesegera mungkin membawa data–data bukti–buktinya semua agar bisa verifikasi di KPU.	Demon/Ilpeng/Mhp/12:57-14:14
30	(Ysf)“Tidak pernah KPU menjawab secara detail secara data, hanya argumentasi, jadi orang–orang di KPU memang orang–orang yang dipasang walaupun saat fit and proper testnya angkanya terendah tapi dipasang orang–orang yang memang jago difens menjawab.	Demon/Ponpem/Mhp/14:14-14:34
31	(Ysf)“Iya, contohnya begini pantaskah seorang pejabat KPU menyikapi rekomendasi itjimak ulama ? kami kan tidak	Demon/Ponpem/Mhp/14:35-14:58

	<p>merekomendasikan kepada KPU, kami rekomendasikan kepada BPN. Masa dia yang jawab. Kami akan tolak rekomendasi itjimak, ya kan lucu, nah ini siapa mereka ini ? layakkah kita akan tetap mempercayai mereka, saya rasa belum.</p>	
32	<p>(Ysf)“Pasti, kecuali KPU nantinya bisa membuktikan dan dia bisa mengambil sikap, contoh sekarang sperti di Boyolali yang saya tadi sebutkan, di Boyolali, di Bengkulu dimana-mana banyak, kejadian-kejadian.</p>	<p>Demon/Pengkes/Mhp/15:04-15:19</p>
33	<p>(Tgb)“Saya dari tadi mendengar pak Yusuf bicara tentang KPU, tetapi yang dibicarakan adalah objek dari BAWASLU, KPU dan BAWASLU dua hal yang beda, jadi semua yang indikasi, kecurigaan tentang pelaksanaan yang disebut dalam tanda kutip kecurangan, keteledoran kan mestinya diadukan ke BAWASLU, KPU memang menurut saya tidak bereaksi karena memang sedang proses untuk melakukan perhitungan berjenjang, jadi menurut saya sih hal-hal yang disampaikan tadi itu lebih tepat disampaikan kepada BAWASLU.</p>	<p>Demon/Pengkes/Mhp/15:22-15:56</p>
34	<p>(Ysf)“Sudah, Tuan Guru Bajang, di daerah-daerah semua sudah disampaikan tetapi tidak ada respons, maka itu melalui BPN pusat, BPN kita minta agar segera menyampaikan kepada KPU pusat.</p>	<p>Demon/Pengkes/Mhp/15:56-16:08</p>

35	(Ysf)“Ada sebagian yang mengakui, tetapi selalu argumentasi yang lebih banyak salah input, sampai kapan persiapan bertahun-tahun masih salah input tidak ada henti-hentinya, contoh sekarang pernahkah? ada fluktuasi yang signifikan? Tidak pernah selalu begini angka 01, 02 terus mau sampai kapan ini begini.	Demon/Ilpeng/Mhp/16:12-16:32
36	(Tgb)” Menurut saya KPU ini institusi yang kita bangun bersama, orangnya juga diisi oleh kesepakatan bersama, bukan ditunjukan oleh pemerintah, ada free por semua partai ikut disitu dan yang saya lihat diseluruh melaksanakan yang dilakukan oleh KPU, baik di pusat maupun didaerah sesungguhnya sudah berusaha imparial berlaku adil untuk semua, dan satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah realcount atau pencapaian suara bagi pasangan calon, menurut saya kan pemilu ini adalah musyawarah tertinggi kita mbak Rosi. Sebagai bangsa, siapa sih pemimpin kita 5 tahun kedepan, semua berpartisipasi one man one vote, hasilnya apa yang tercermin didalam pemerolehan dari masing-masing calon., iya itu konsekuensi dari pemilihan masyarakat.	Demon/Pengkes/Mhp/17:08-17:56
37	(Ysf)” Iya mudah-mudahan nantinya akan merugikan 01, sekarang masih merugikan 02 terus, salah inputnya, enggak pernah salah input dua-duanya, kalau sekarang yang korban begitu besar 320 sekian dan yang sakit 500 mungkin sudah 550 sekian, saya pikir ini kok belum pernah ada pemilu didunia yang korbannya sebesar ini gitu kan, kena apa gitu kan, ada apa, kalau bicara orang lembur, orang yang kerja dilapangan, orang yang kerja rekkening dan sebagainya,	Demon/Pengdat/Mhp/19:17-19:47

	kerja lembur biasa, tapi tidak pernah ada yang seperti ini.	
38	(Tgb) "Sebagai aspirasi ya, siapa yang bisa melarang aspirasi ya mbak Rosi, tapi kan kita punya akal, kita punya penalaran, kita punya pencermatan sebenarnya kalau bicara pemilu ini sekali lagi ini musyawarah tertinggi kita, dan sertifikat dari msyawarah itu ada di c1 namanya, c1 itu dibuat enam loh mbak Rosi, c1 dikasih kepada saksi 01,02 dan yang 4 itu dibagi sesuai dengan peraturan yang ada, artinya kan nanti tinggal disesuaikan saja, dilihat masing-masing pegang c1 ketika misalnya beda ya nanti dicek, mana yang asli, mana yang mungkin ada perubahan dan menurut saya kalau kemudian kita mengalihkan hal-hal yang lain kita lepas dari hasil pemilu ini kan masyarakat sudah mencoblos, itu hasilnya ada di c1 itu tercermin, kalau kita beralih pada hal yang lain, kan sama saja tidak menghormati lebih dari 80% yang sudah mengikuti musyawarah itu dengan penuh semangat keinginan untuk memilih pemimpin yang mereka anggap bisa membawa Indonesia yang lebih maju.	Demon/Ilpeng/Mhp/25:57-27.03
39	(Tgb) " Kalau saya dengan segala penghormatan saya kepada tokoh agama iya, Ulama yang hadir di perhelatan politik yang terakhir tapi saya tetap menyampaikan bahwa lebih cocok disebut perhelatan politik bukan Istim'a Ulama, kenapa? sebabnya sederhana ssekali karena yang hadir tidak semua Ulama, kalau dikomposisikan mungkin fiktif ada para Ulama, ada para pekerja politik, tokoh politik, ada pengusaha dan beragam sehingga bagi saya sih dengan segala penghormatan yaitu perhelatan politik dari teman-teman yang menyokong pasangan	Demon/Ponpem/Mhp/30:10-31:42

	<p>bapak Prabowo dan Sandiaga Uno iya tentu kepentingannya adalah untuk kepentingan paslon nomer 02 dan itu wajar menurut saya.</p>	
40	<p>(Tgb)” Dan kemudian beliau keluar memang tapi tidak mendekler kemenangan, kemudian setelah itu ada gesture berikutnya yang disampaikan oleh beliau berikutnya, menyampaikan saya mengutus seseorang tapi kemudian belum–belum di tutup pintunya, menurut saya cobalah dilihat bahwa rangkaian dari peristiwa itu tidak mendekler walaupun Qouikcount sudah memberikan angka yang jelas, kemudian yang kedua menyampaikan untuk mengirim utusan itu gesture positif untuk mengurangi kristalisasi kita.</p>	Demon/Ilpeng/Mhp/31:44-32:20
41	<p>(Ysf)” Jam 3 sore kami mendengar, 01 Jokowi akan mendeklerasikan kemenangan, maka dari itu kami segera saat itu juga, begitu mendengar berita saya bersama pak Prabowo bersama beberapa teman kedepan presscon deklarasi.</p> <p>(Ysf)”Karena kami dengar mereka akan mendeklarasikan dulu</p>	Demon/Ilpeng/Mhp/32:34-32:45, 32:48-32:50
42	<p>(Tgb)” Dan prasangka ini perlu dihilangkan dengan membanyak perjumpaan, memperbanyak silaturahmi dan menurut saya beberapa waktu terakhir pak Jokowi juga terus menerus berusaha untuk membangun silahurohim, ambilah itu sebagai gesture dari bagaimana kehendak beliau, agar kita kembali kokoh dan kohesif kita kohesifitas kita semakin kuat. Sudah</p>	Domen/Ponpem/Mhp/34:21-34:53

	cukuplah kita mau ngapain lagi? pemilunya sudah selesai. Kita mau.	
43	(Ysf)" Selama tidak melanggar dan tidak ada kecurangan, pasti diterima, siapa pun yang menang, kita kalah pun, 02 kita pasti terima,	Demon/Ponpem/Mhp/36:09-36:15
44	(Ysf)" Iya pasti dong, memang preman tidak , pak Prabowo 2x dikalahkan, 2014 ada kecurangam gak ? saya tanya, coba tanya sama Khusnul Maria yang tadinya di KPU, apa keterangannya, kemarin hasil rekomendasi di dalam Istim'a Ulama yang ketiga itu khusnul Maria ada memberikan rekomendasi, pakar-pakar IT semua bukan ecek-ecek enggak, berproses itu satu hari dari pagi.	Demon/Ipeng/Mhp/36:17-36:38
45	(Ysf)" Iya, kan kita sekarang dari Istim'a ketiga itu merekomendasikan agar BPN sesegera mungkin, kita ini mensesegera mungkin itu adalah satu sinyal baik , jangan ditunggu sampe tanggal 22 nanti akhirnya masyarakat melihat nasibnya ternyata diputus.	Demon/Ponpem/Mhp/37:25-37:41
46	(Ysf)" Pasti, mangkanya saya bilang kenapa KPU kok tiba-tiba genit, kami akan menolak rekomendasi Istim'a ketiga, orang dia enggak ada urusannya sama kita, rekomendasi tidak di kasih ke kita, masak enggak di lamar ngenolak kan lucu kan.	Demon/Pengkes/Mhp/37:44-37:56

47	(Ysf)'' Konteksnya tapi dia sebut Istim'a ketiga, kalau tidak sebut rekomendasi Istim'a ketiga fine betul itu jawabannya,	Demon/Ponpem/Mhp/38:18-38:24
48	(Ysf)'' Surat cinta kami kepada BPN, masak mbak yang nolak kan enggak mungkin, kami ngirim suratnya ke BPN, kok sana yang menolak, kan BPN waktu menemui KPU kan tidak bilang ini dapat surat dari GNPF kan tidak , kan beda konteksnya sudah.	Demon/Pengkes/Mhp/38:30-38:45
49	(Ysf)'' Sebelum Yusnar ya Yusnar mas Tuqi Baidowi sudah menyikapi tentang itjimak ulama yang ketiga, mas Tuqi baidowi itu TKN setelahnya Zainut Tauhid wakil ketua umum, Zainut Tauhid adalah kalau tidak salah orang parlemen dari paslon 02, pendukung paslon 01, kalau ada dari pengurus MUI yang menyatakan tentang Istim'a Ulama yang ketiga, memang MUI itu secara tidak langsung hampir terbelah, ada yang ke 02, ada yang ke 01, alasannya apa? jangan di bilang GNPF mau memecah belah ulama, justru karena adanya Istim'a Ulama dari GNPF yang diangkat adalah Ulama, ketua umum majelis Ulama, saya bendahara di MUI mbak Rosi.	Demon/Ponpem/Mhp/39:15-40:05
50	(Tgb)''Iya jelas, karena memang yang hadir di perhelatan politik yang ditajukkan Istim'a Ulama kan tokoh-tokoh agama yang memang kuat mendukung pasangan 02, ya menjadi jurkam masuk dalam struktur BPN bahkan, adapun yang tidak satu aspirasi	Demon/Komper/Mhp/40:21-40:54

	tentu tidak terwakili dsitu dan saya ingin sampaikan bahwa semangatnya yuk kita bicara berjumpa satu sama lain dan untuk keuntungan siap juga kita mau polarisasi terus.	
51	(Ysf) Ahlan wasalan. Enggak mungkin kita menolak namanya diskusi, tabayun iya tapi bukan rekonsiliasi, apa yang di rekonsiliasi wong gak ada masalah kok, jadi kalau keluhan–keluhan dari kami yang seperti Tuan Guru bilang kecurangan itu tidak hanya terjadi di 02 saja, di 01 ada ayolah kita duduk, kita ini inisiatif bagaimana caranya kita sepakat tolong dicatat saya berjuang pribadi saya menyatakan saya bukan hanya spesial untuk 02, saya demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Clear buat saya.	Demon.Ponpem/Mhp/41:20-41;56
52	(Mqd): Baik pertama begini Quickcount ini kita laksanakan untuk mendapatkan data di tingkat nasional jadi ada grade nasional memang data itu bisa break down ke dalam Provinsi–Provinsi tetapi ketika di breakdown kedalam Provinsi maka kita harus sangat hati–hati karena di tiap Provinsi itu jumlah mari verelnya berbeda–beda jadi kalau untuk Quickcount tingkat nasional, mari verel Quickcount ini adalah +-1% dengan 1.200 responden tps ya kalau di Indo Barometer. Untuk lembaga lain ada yang 2.000 bahkan ada yang sampai 6.000 jadi boleh dibilang memang untuk semua Lembaga yang melakukan quickcount tes TPS responden Indo Barometer paling kecil, kenapa 1.200 sudah dihitung oleh ahli statistika kami bahwa 1,200 itu sebetulnya sudah cukup jadi tidak perlu kita tidak terlalu mengejar harus analisa perprovinsi	Demon/Ilpeng/Mhp/47:54-50:14

	itu kemudian bisa dilakukan satu persatu begitu.	
52	(Mqd)” Ini untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa tidak ada permainan antara lembaga survey, masing–masing lembaga survey berjalan dengan metodologi masing–masing, kalau memang ini sudah didesain maka kemudian iya kenapa enggak sekalian aja semuanya 01 menang dan ternyata 02nya kalah begitu, saya tambahkan lagi ini biar–biar real ya cics-cics juga yang menang, cics kan juga sering dituding lah ya dengan kepanjangan nama dan siapa yang ada dibelakangnya, ini di 02 di Bengkulu yang menang adalah sory di Bengkulu yang menang adalah 02:53,38% begitu, jadi tidak bisa disamakan.	Demon/Ilpeng/Mhp/51:34-52:07
53	(Ysf)” Iya, jadi secara keseluruhan ya, saya tidak bicara kis per kis ya, kalau kis per kis tadi kan sudah diakui ada kesalahan tapi yang menang yang diuntungkan adalah 01, dengan sampling 1.200 tadi kan ya, karena pada paduan nasional ya pak.	Demon/Ilpeng/Mhp/52:21-52:36
54	(Ysf)” Iya, karena waktu pada tanggal 17, kami sudah mendapat data, ada 3 yang memberikan informasi tetapi yang 2, saya tidak layak membuka, tapi yang 1 dari PKS karena iya memang secara formal, itu dari 2.200 itu sudah menyatakan angkanya 51 sekian untuk 02 itu pada tanggal 17, kalau kembali lagi kepada tidak kepercayaan kepada quickcount karena kalau sekarang dari quickcount ini, beberapa quickcount daripada lembaga survey yang diquickcount semuanya sudah menyatakan bahwa 01 menang ya kita nanti lihat,kami tidak terlalu	Demon/Ponpem/Mhp/52:38-51:41

	dini, kalau kami mau menyikapi saat ini, ketidakpuasan dan kekecewaan itu pasti, karena ya itu tadi kendalanya banyaknya temuan-temuan kecurangan-kecurangan yang ada. Jadi apapun hasilnya yang keluar hari ini sebelum itu diverifikasi kecurangan-kecurangan itu belum terjawab pasti akan jadi blunder.	
55	(Mqd)"Saya setuju memang tidak menjadi keputusan, sekali lagi yang menjadi keputusan menurut undang-undang adalah hitung manual KPU. KPU pun untuk kita ingatkan kepada pemirsa, melakukan perhitungan itu 2 macam, yang pertama online yang sekarang situng yang sekarang kita jadikan referensi, yang kedua yang rekap manual yang bertahap itu, kalau situng ini kan formulir-formulir c1 langsung di upload online ya, tidak ada tahapan-tahapan tapi nantinya menjadi dasar untuk penetapan pemenang secara resmi adalah hitungan manual begitu.	Demon/Pengkes/Mhp/53:58-55:00
56	(Ysf)" Tidak semua daerah mengakui kesalahan-kesalahannya ada dari awal saya juga sudah sebutkan ada daerah yang mengakui iya betul ada kecurangan, ada kesalahan iya tidak akan mungkin bilang kecurangan.	Demon/Pengkes/Mhp/59:39-1:00:02
57	(Ysf)" Bisa, kalau memang nantinya sudah ada verifikasi KPU sudah mulai ada perhatian, BAWASLU ada perhatian, pasti kesannya angkanya pasti beda karena sudah terkontrol, melibatkan TKN, melibatkan BPN selesai. Iya pasti lain, iya pasti lain angkanya pasti begini nyalip nanti 02.	Demon/Pengkes/Mhp/1:01:57-1:02:27

58	<p>(Ysf)'' Kan begini mbak, kalau tidak ada rasa ketakutan kalah, tidak harus menang kenapa semua aparat ngancam. Mau nembak ditempat, mau ini-ini kenapa? tapi tidak ada pendekatan-pendekatan persuasif gak ada, tidak ada yang arahan satu ngancam perang total, satu bilang begini, kenapa? ada apa negeri ini mau dikemanain. Itu menjadi pertanyaan, santai kok pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu sebelumnya santai kok gak ada masalah, kesalahan-kesalahan, kekurangan ya itu toleransi, tapi ini kayaknya ada keanehan dari mulai sejak awal, coba lihat 1 KK bisa ada orang sampai 1.000 lebih ini apa? bukan 1 ditemukan loh itu, berapa KK itu coba?</p>	Demon/Ilpeng/Mhp/1:02:37-1:03:23
59	<p>(Tgb)'' Saya sama sekali tidak melihat itu dilapangan, jadi saya tidak bisa memberikan komentar lebih dari yang saya tahu, dan saya tidak melihat sama sekali, kalau tadi ada sebutan tembak ditempat segala macam, saya fikir bukan hanya di pemilu iya, ketika lebaran pun iya kalau kepolisian misalnya memberikan peringatan kepada begal segala macam penindakan hukum repressif gitu. Jadi konteksnya kalau kepada pihak-pihak yang akan melakukan anarkisme yang akan merusak ketertiban sosial itu memang ada tingkatan-tingkatan penanganan itu biasa lah bukan hanya di pemilu.</p>	Demon/Ponpem/Mhp/1:03:30-1:04:12
60	<p>(Mqd)'' Saya kira enggak usah pakai quickcount ya, karena data walaupun belum 100% tetapi menurut saya sudah cukup menggambarkan, dan memang dari data situng yang masuk ini Realcount, Realcount yang masuk ini saya melihatnya kelihatannya cukup proposional artinya tidak bias di satu titik. Jadi kalau data yang</p>	Demon/Pengdat/Mhp/1:04:53-1:06:02

	<p>tadi siang saya minta staf untuk rekapitulasi dari 34 Provinsi yang ada, kalau 2014, 33 Provinsi sekarang 34 Provinsi ya, itu provinsi dengan jumlah data masuk paling kecil itu kalau saya lihat disini adalah Papua 5, kemudian Papua Barat 18%. Mungkin ini yang kita ceritakan sedikit supaya pemirsa punya gambaran mengenai distribusi data yang sudah masuk ya, kemudian yang masih kecil juga adalah Jawa Timur 42% kemudian Jawa Barat 41%, yang sudah 100% satu-satunya adalah Bengkulu, yang mendekati 100% ada Sulawesi Tenggara 97,7%, dan Gorontalo 97,9%, tetapi banyak juga daerah-daerah yang sudah 80% maupun 70%.</p>	
61	<p>(Ysf) Saya alhamdulillah tidak melihat Ulama pecah, walaupun ada indikasi-indikasi ke arah situ, tapi Ulama tidak pecah seperti saya dengan Tuan Guru Bajang, walaupun berbeda tidak ada masalah, tidak ada itu hanya seting semuanya seolah-olah kita benturkan karena dinggap penentunya adalah Ulama saat ini, padahal enggak, masyarakat yang lain masih banyak yang ikut dalam pilpres dsb. Insya Allah tidak saya yakin tidak.</p>	<p>Demon/Ponpem/Mhp/1:14:26-1:14:51</p>
62	<p>(Tgb) Insya ALLAH iya bagi para Ulama, sebenarnya perbedaan pandangan, pendapat pilihan politik itu sesuatu yang wajar. Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ada yang mengukur kalau saya misalnya kemaslahatannya keberlanjutan, menyelesaikan semua pondasi, ada yang lain juga beda tapi tetap dalam semangat persaudaran, nah kalau</p>	<p>Demon/Ilpeng/Mhp/1:15:08-1:16:29</p>

	<p>kemudian ada pertanyaan seperti yang tadi sebelumnya iya, apa kemudian harus diam menghalalkan kecurangan saya pikir tidak ada Ulama yang menghalalkan kecurangan, pertanyaannya adalah indikasi itu benar atau tidak, skalanya apakah itu seperti disampaikan apakah itu kenakalan-kenakalan oknum di bawah sebagaimana yang kita potret, ada kelalaian juga, ada faktor kelalaian dan segala macam, tapi intinya adalah kalau bicara tentang kejujuran, kecurangan itu bagian-bagian fundamental.</p>	
63	<p>(Ysf) "Cara lain iya sama tadi seperti usulan rekomendasi Istim'a Ulama yang ketiga, ini contoh saya kasih contoh ada satu daerah DPTnya 269, yang hadir 220 perolehan suara 01 :149, 02:70 total suara 299 DPTnya 269 yang hadir 220, total suara 299. Nah ini kan harus dijawab.</p> <p>(Ysf) "Sekarang inilah temuan-temuan ini yang akan dilaporkan, jadi jangan alergi dengan pesan sebuah masukan atau protes. Ini contoh saya kasih, pertandingan sepak bola 45 menit x 2, hakim garis tidak fer, pemain main kasar, pertanyaan saya apakah ditunggu 90 menit? Atau dihentikan pertandingan, atau diberi sanksi yang melakukan pelanggaran simpel.</p> <p>(Mqd) "Itu pelajaran sepak bola, tapi beda sedikit, karena kalau pemilu, pemilunya tunggu selesai dulu, baru ada hakimnya, memang bisa dikoreksi juga pak, tapi kalau menurut undang-undang yang saya baca ini tidak bisa di hentikan sampai proses penghitungan ini ketok palu kalau ada keberatan nanti di bawa Mahkamah Kontitusi, mungkin bisa kayak gitu pak.</p>	Demon/Ilpeng/Mhp/1:17:10-1:19:20

	<p>(Ysf) "Silahkan, tidak ada masalah, iya saya paham tapi temuan-temuan ini harus tetap kita sampaikan .</p> <p>(Mqd) "Pointnya adalah keberatan akan disampaikan.</p>	
64	<p>(Tgb) " Menurut saya memang tidak usah berlebihan iya didalam menyikapi hasil sementara kan proses terus berjalan, puncaknya 22 mei kita tunggu lah dan ketika kemarin saya ke Jawa Timur, Jawa Tengah ada beberapa kegiatan masyarakat sudah kembali kok keaktivitas masing-masing, jangan-jangan hanya kita yang masih meributkan, semua ingin kedamaian dan saya fikir Indonesia bisa maju dan hebat ya kalau kita bisa menyatu kembali.</p>	Demon/Ilpeng/Mhp/1:19:26-1:19:52
65	<p>(Arf) " Saya fikir perlu menginformasikan kepada publik bagaimana proses rekap disetiap Kecamatan, bukan hal yang mudah, bukan hal yang bisa cepat diselesaikan membutuhkan energi yang panjang, konsentrasi yang panjang, kekuatan fisik, mental ,jadi kita terus jaga bersama-sama iya, mereka menghadapi tekanan bukan hanya secara fisik, tapi mental itu juga harus dikuatkan oleh kita, supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan saya berdoa mudah-mudahan temen-temen di Kecamatan, di Kabupaten, di Kota, kemudian di Provinsi bahkan nanti tingkat nasional, semua tetap diberi kekuatan, kesehatan untuk menjalankan tugas ini tuntas sampai selesai. Demi bangsa dan negara.</p>	Demon/Ponpem/Pmn/07:15-08:00

66	(Egl)'' Bahkan,ada ide gemilang betul dari teman-teman PURSAKO atau pusat kajian konstitusi di UNAN yang mengatakan begini pemilu serentak tanpa presiden therlod itu sebetulnya bisa saja pencalonannya yang serentak untuk menghindari oligarki tadi iya kan, untuk mencegah bangsa yang terbelah tapi pelaksanaannya nanti bisa tetep DPR dulu, baru pemilu Presiden.	Demon/Komper/Pmn/1:34:34-1:35:00
67	(Egl)'' Bang Hamdan adalah kalau misalnya pembentuk undang-undang dalam 5 tahun 2 bulan itu pakai studi banding lagi, mereka studi banding berbagi luar negeri uang rakyat juga lalu kembali dan mengatakan kalau begitu kita bedakan 2 pemilu nasional serentak dan pemerintah daerah serentak, apakah itu bertentangan? karena pemilu nasionalnya serentak Presiden, DPR,dan DPD misalnya.	Demon/Ponpem/Pmn/1:36:12-1:36:38
68	(Egl)''Dan anehnya, enggak, bukan maksud saya begini disimulasi itu ada ilmunya simulasi ada teorinya, metodologinya di 300 TPS itu tidak ditemukan kelelahan yang menyebabkan kematian akut, kalau simulasi itu dibuat betul-betul dengan ilmu yang benar. Bisa diantisipasi misalnya ditempatkan satu tenaga medis, satu unit tenaga medis, untuk 10 TPS, tapi jangan lupa beban kerja 2014 sebetulnya sama dengan 2019, pertanyaanya?	Demon/Ilpeng/Pmn/1:38:50-1:39:20

69	<p>(Egl)'' Saya ingin mengatakan secara moral saya sampai tahap ini siap bertanggung jawab dulu, terhadap, iya dong karena mohon maaf tidak sedikit yang dulu memuji ini bagus kemenangan rakyat dan lain-lain, sekarang balik badan tinggal kita sendiri yang lain bilang oh ini jelek, harus dicari siapa tersangkanya ada wartawan namanya Dimas Soemanto itu langsung menulis siapa pengusul pemilu serentak? langsung enggak ada masalah secara moral pertanggung jawaban ilmuan itu mari kita buka-bukaan.</p>	<p>Demon/Ponpem/Pmn/1:45:30-1:46:03</p>
70	<p>(Egl)'' Oke, kalau enggak begini lokataru iya dengan Haris Azzar atau teman-teman aktifis mari kita tuntutan karena yang pertama ini kan kita berada ditingkat haduh pemilu yang kebenciannya yang sudah sampai sangat tinggilah, apa saja?</p>	<p>Demon/Ponpem/Pmn/1:46:38-1:46:51</p>
71	<p>(Egl)'' Enggak, bukan maksud saya begini ya jangn juga cepet-cepet kita memuji atau sebaliknya jangan juga kita cepet-cepet kita menyalahkan pada oh ini salah pemilu serentak., padahal undang-undang dasar kita bilang begitu , nah mungkin menjawabnya begini Rosi di masa depan mohon maaf ini Rosi di masa depan perlu kita tanya sama – sama dengan segala pemikiran dan peradaban unggul kita yang mudah-mudahan tidak terpecah begitu, boleh enggak ke Mahkamah Konstitusi kalau betul-betul pemilu serentak ini berarti pemilu serentak nasional, dan pemilu serentak daerah, pemilu nasional serentak dan pemilu daerah serentak, kalau bisa itu salah satu jalan keluar atau begini.</p>	<p>Demon/Ponpem/Pmn/1:49:17-1:49:51</p>

**Tabel 4.4 Daftar Tuturan Bentuk Retorika Deliberativ Politisi Pada Acara Rosi Di Kompas TV**

No	Retorika Deliberativ	Koding
1	(Lkn)” BUMN itu tidak boleh ditim kampanye nasional tidak ada satu pun pejabat BUMN yang sebagai masuk sebagai tim, bukan saja sebagai direksi bahkan komisaris sekali pun mereka tidak boleh iya.,dalam tim kampanye.	Deli/Pengkes/Ppp/07:54-08:07
2	(Arf)” Iya,ada banyak pikiran sebetulnya di KPU, yang pertama sempat terfikir kami ingin mengundang pak Jokowi dan pak Prabowo melihat situng di kantor KPU mungkin kalau ada kesempatan saya fikir ini akan bakal setuju, itu cara yang mungkin di tidak terlalu penting bagi orang, tapi bagi KPU penting.	Deli/Ponpem/Ppp/1:19:54-1:20:53
3	(Ysf)” Sebagian mengaduhkan, sebagian mempertanyakan, sebagian apa tindak lanjut BPN, apakah GNPF sudah menghubungi BPN, dan informasi–informasi yang memang kita membacanya, walaupun itu bukan laporan kepada kami begitu. Itu yang menjadi awal mula kita berfikir ini harus segera di adakan istim’a alasan apa segera? karena tanggal 5-6 mei sudah masuk bulan puasa.	Deli/Ponpem/Mhp/02:58-03.26
4	(Tgb)”Saya termasuk orang yang sangat menyayangkan apa yang keluar dari perhelatan politik yang disebut istim’a ulama ketiga, kenapa saya menyayangkan iya karena walaupun saya menganggap atau melihat itu bahwa itu murni perhelatan politik tetapi kan menggunakan nama atau tajuknya istim’a ulama ketiga.	Deli/Ponpem/Mhp/04:23-05:09
5	(Tgb)” Saya menyayangkan karena yang keluar itu beberapa hal yang menurut saya yang melampaui batas. Termasuk misalnya dalam poin	Deli/Ilpeng/Mhp/05:11-05:30

	keempat yang disitu langsung menyebut meminta untuk mendiskualisasi calon presidennya.	
6	<p>(Ysf)''Memutuskan, menetapkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan bersifat berstruktur sistematis dan masif dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019.</li> <li>2. Mendorong dan meminta kepada badan pemenangan nasional Prabowo–Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal prosedural tentang terjadinya berbagai kecurangan dan kejahatan yang terstruktur sistematis, dan masif. Dalam proses pemilihan presiden 2019</li> </ol>	Deli/Ilpeng/Mhp/06:37-07:28
7	<p>(Tgb)'' Saya merasa bahwa memang kita ini kan karena ada dua calon, jadi polarisasinya kuat sekali dalam tanda kutip seperti kita berada masing– masing tempurung, kalau dalam tempurung itu yang kita teriakkan itu kan kembali ke kita, bahkan lebih besar lagi dengan responasinya. Kemudian kita membangun jejaring informasi yang juga kelompok kita juga, maka kemudian informasi yang sama itulah yang terdistribusi didalam kelompok kita, seakan–akan itulah kebenaran, yuk kita buka itu, kita keluar baru kita berjumpa, indonesia bagusnya kemewahan berdemokrasi kita bahwa semua proses demokrasi ini ada mekanismenya.</p>	Deli/Ilpeng/Mhp/11:27-12:11
8	<p>(Tgb)'' Iya tentu, harus kita sikapi, karena apa, karena sikapnya itu adalah yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak merupakan kemasalahatan kita, untuk meragukan bukan institusi negara, yang bekerja imparial yang melindungi kepentingan kita semua,dan jangan</p>	Deli/Ilpeng/Mhp/17:58-19:08

	<p>lupa mbak Rosi, pak Yusuf juga salah input itu sampai sekarang menurut komisioner 159 disisi lain ada 300an kalau salah yang pEtugas KPU relawan yang meninggal dunia, apa iya kemudian kita tidak berempati proses yang panjang yang mereka lakukan, yang bisa saja ada kesalahan 1, 2 input kan bukan hanya input pilpres, mereka harus menulis apa c1 untuk DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten,dan itu jauh lebih rumit daripada pilpres, jadi saya ingin mengajak kita yuk kita empati, tetap kita awasi dan kawal tapi jangan kemudian dari awal kita membangun 1 delegitimasi bagi 1 Institusi yang kita nnti akan rugi sendiri.</p>	
9	<p>(Ysf)''Justru kita menganggapnya bukan lagi empati, justru harus bertanya tanya, ini ada apa? adakah yang pernah divisum? Tidak ada, adakah yang dari pemerintah merespons ingin berkunjung? KPU pun gak ada, udah begitu aja selesai hanya cuman kita lihat meninggal sekian–sekian ini.</p> <p>(Rsi)''Hari ini diberikan santunan, pemerintah memberikan bantuan,</p> <p>(Ysf)''Alhamdulillah</p> <p>(Rsi)''KPU juga mendesak kepada kementerian keuangan supaya uang santunan diberikan.</p> <p>(Ysf):Alhamdulillah, kita senang sekali, kasihan mereka kan.</p>	<p>Deli/Ilpeng/Mhp/19:49-20:18</p>
10	<p>(Ysf)''Iya itu aspirasi daripada yang hadir di Istim'a Ulama karena adanya kecurangan–kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif, apabila nanti ditemukan benar-benar itu kecurangan kira–kira apa sanksinya? apakah pemilunya diulang? kalau ada pertandingan dua</p>	<p>Deli/Pengkes/Mhp/24:14-24:30,24:40-</p>

	<p>orang bertanding yang satu sudah jelas menang, tiba-tiba yang satu melakukan kecurangan, apakah dia yang diberi sanksi atau pertandingan yang diulang.</p> <p>(Rsi)''Jika kecurangannya terbukti?</p> <p>(Ysf)''Kecurangannya terbukti itulah yang kita mau membuktikan kecurangan ini yaitu KPU harus membuka diri, harus mau menanggapi apa yang disampaikan oleh BPN nanti.</p>	
11	<p>(Ysf)''Kesimpulan 5 poin dihadiri oleh paslon nomer 2, dihadiri partai koalisi ada 2 partai koalisi yang hadir ditempat ikut membahas, mengoreksi agar jangan melanggar hukum, ikuti kontisiuonal, dan secara syar'i, jadi tidak ada yang aneh dari istim'a, rekomendasinya pun tidak ada yang aneh, kalau ada orang dari Partai Demokrat menyatakan mungkin menurut saya karena dia belum tau apa yang terjadi di dalam Istim'a, itu saya pikir sah-sah saja, dan kami tidak ada keterkaitan dengan koalisi Partai, itu urusan daripada paslon nomer 2, kami hanya sebagai Ormas, Relawan, sebagai pendukung nomer 2 begitu saja.</p>	Deli/Ilpeng/Mhp/28:22-29:12
12	<p>(Ysf)'' Iya, kalau sebagai penghormatan saya pasti tidak mungkin bilang tidak akan mengundang Tuan Guru Bajang, tapi kalau Krionia atau Istim'a Trisakti kan nggak mungkin mengundang alumni dari UI kan begitu, dan yang terjadi permasalahan itu kan di 02, masa kita mengundang TKN kan jadi semrawut nantinya kan.</p>	Deli/Ponpem/Mhp/29:33-29:52
13	<p>(Ysf)'' Bukan masalah siapa duluan , kalau mereka sudah medeklerasikan sudah selesai dianggap kita sudah kalah, ini kan pembentukan</p>	Deli/Ilpeng/Mhp33.03-33:21

	opini saja, kalau mereka tidak mendeklarasikan Insya ALLAH 02 tidak akan mendeklarasikan.	
14	(Ysf)'' Saya gak tau, siapa yang diutus. Apakah pantas pak Luhut diutus. Apakah pak Luhut Presiden? setiap masalah pak Luhut harus turun, dari awal sudah menyatakan hal yang tidak sesuai kalau mau utus, utuslah mungkin Tuan Guru Bajang seorang utama mendekati karena pak Prabowo banyak didukung oleh ulama kan begitu, apakah pak KH Ma'aruf Amin memanggil kita akan lebih soft , kalau sudah yang diutus seperti begitu terus pertemuannya hanya berdua ini kan hanya menimbulkan perpecahan lagi diantara kita, begitulah yang terjadi .	Deli/Ilpeng/Mhp/33:26-34:07
15	(Ysf)'' Iya kalau sedang berproses tidak perlu ada pertemuan dong Tuan Guru Bajang. Kalau pertemuan-pertemuan biasa itu tidak masalah kenapa harus ada pertemuan terus dianggapnya sudah selesai, Pemilu sudah selesai itu. Sedang berproses.	Deli/Ilpeng/Mhp/34:57-35:11
16	(Tgb)'' Saya fikir, gini loh pak Yusuf, pertemuan itu kan bukan berarti kemudian satu pihak mengakui dia kalah, kalau tidak mau mengakui kalah kita bertemu saja bicara, kan beliau berdua ini kan simbol jutaan, puluhan, juta rakyat kan melihat gesture yang positif saja, salaman saja.	Deli/Ponpem/Mhp/35:11-35:33
17	(Ysf)''Iya, bukan mendesak iya, mendesak melalui BPN agar BPN mendesak KPU,itu udah pasti mbak, udah dipelajari semua dari sisi hukumnya.	Deli/Pengkes/Mhp/38:51-38:59

18	(Ysf)'' Kami tidak pernah mau menunggu keputusan akhir KPU tanggal 22, kami akan berjuang semaksimal mungkin agar KPU dapat meverifikasi data–data temuan dari kami, karena kalau sudah diputuskan tanggal 22 selesai, tamat harus ke MK.	Deli/Pengkes/Mhp/42:17-43:04
19	(Mqd)''Pertama memang Indo Barometer melaksanakan Quickcount ya semau–maunya Indo Barometer sendiri dalam pengertian tidak ada ernjemen yang lain lain, buktikan saja misalnya dari jumlah TPS sudah berbeda sampelnya, yang lain ada 6.000, Barometer 1.200, Kompas 2.000 iya tidak ada komunikasi antar Indo Barometer misalnya dengan Kompas dan seterusnya dan saya mau tunjukkan, ini saya ada 4 data ya, Indo Barometer untuk di Bengkulu yang unggul adalah 01 dengan selisih sekali lagi sangat tipis ya, tapi kemudian ada SMRC ini yang di Bengkulu yang unggul adalah 02 jadi di 02 ini angkanya untuk Prabowo–Sandi adalah 53, 38%..	Deli/Ilpeng/Mhp/50:22-51:32
20	(Ysf)''Kalau nunggu hasil KPU itu bukan salah satu target kami, justru kami tidak mau ada permasalahan di hasil–hasil akhir tanggal 22, kami akan kasarnya menjemput bola agar ada vervikasi dari BPN terhadap KPU atas temuan–temuan kecurangannya.	Deli/Pengkes/Mhp55:19-56:13
21	(Ysf)''Kalau kita bisa dari awal kan lebih bagus daripada kita menunggu nanti nasib kita hanya ditentukan dengan keputusan sepihak. Kalau ditemukan kecurangan–kecurangan masak kita mesti diem terus sampai tanggal 22. Boleh dong kita menanyakan MK, ada temuan ini–ini kroscek dong, baik yang tadi seperti Tuan Guru bilang dari mulai BAWASLU, sampe ke KPU semua.	Deli/Pengkes/Mhp/56.30-56:53

22	(Tgb)” Sehingga saya sampaikan bahwa penting betul, yuk sudah lah polarisasi bangun silaturahmi dan itu dicerminkan salah satunya para panutan kita, tokoh–tokoh kita mengeluarkan ujaran–ujaran yang menenangkan dan menyamankan masyarakat, apalagi sebentar lagi akan masuk bulan suci Ramadhan. Ada kewajiban disitu untuk menghadirkan ketenangan dan nyaman untuk semua.	Deli/Ponpem/Mhp/1:04:13-1:04:37
23	(Mqd)” Padahal DKPP itu menurut saya adalah mekanisme penting yang justru ini yang konsen bapak sebelum ke MK, jangan sampai nunggu MK kalau ada masalah dilapangan mau diselesaikan itu DKPP, tolong ke DKPP, tapi herannya DKPP tidak kedengaran suaranya, menurut saya DKPP harus ikut ngomong juga ya karena dalam situasi seperti ini sekarang saat ini saya kira inisiatif–inisiatif komunikasi itu diperlukan, memang DKPP kalau gak ada masalah jangan ujuk–ujuk datang begitu, tetapi dalam situasi seperti sekarang mereka harus kasih masukan juga gitu loh kepada semua pihak bahwa kalau anda punya keberatan dengan KPU, anda punya keberatan dengan BAWASLU, anda datang kepada kami namanya DKPP	Deli/Pengkes/Mhp/1:22:17-1:23:36
24	(Egl)” Kalau memang ada peraturan hukum yang mengatakan pengaju judicial review yang kemudian dikabulkan lalu bisa diseret dengan aturan hukum apapun saya siap, ini pelan–pelan sekali saya mengucapkannya pada waktu kami mengajukan itu, penuh dengan kajian yang sangat dalam diperkuat oleh ahli–ahli seperti Prof Saldrisa yang sekarang hakim konsttusi ahli hukum tata negara Irman putra Nasidin, ada prof Hamdi mulk yang sudah memperhitungkan psikologi politiknya, ada Didik Supriyanto ahli	Deli/Pengkas/Pmn/1:22:17-1:24:14

	<p>kepemiluan dari Perludem dan kemudian juga saksi fakta yaitu KH. Slamet Effendi Yusuf ketua badan Ad Hoc pada waktu amandemen, yang ingin saya katakan begini pada tahap mengajukan itu, itu adalah original inter jadi kehendak asli dari undang–undang dasar kita atau yang membentuk undang-undang dasar kita, jadi pada waktu kami mengajukan tidak bisa tidak, jadi saya pelan–pelan mengucapkannya tidak bisa tidak hakim Konstitusi kalau mereka mengawal Konstitusi mereka harus mengabulkannya, karena itulah original inter dari undang–undang dasar kita.</p>	
25	<p>(Egl)” Bukan,imajinasi, enggak papa kalimatnya imajinasi pada waktu itu, tapi tidak ada pemilu di dunia yang dilaksanakan secara serentak yang mnggunakn Presidential Therelod.</p>	<p>Deli/Ilpeng/Pmn/1:32:38-1:32:48</p>
26	<p>(Egl)” Ini persoalan kalau ada yang mengaku kecolongan pada konteks manajemen pemilihan, wah anda mengakibatkan sekian ratus orang mati loh kalau berbicara begitu, mangkanya saya mengajurkan pada keluarga korban tuntutan, tuntutan bahwa nanti Effendy Gozali adalah salah satu orang yang termasuk harus bertanggung jawab dan harus dipidana siap, jangan jadi pengecut</p>	<p>Deli/Ponpem/Pmn/1:46:06-1:46:31</p>

#### 4.5 Daftar Tuturan Retorika Politisi Pada Acara Rosi Di Kompas TV

No	Retorika Forensik	Koding
1	<p>(Ss)”Saya ingin menyampaikan 1, 1 pertanyaan dari seorang kawan bahwa “mas katanya kan anda klaim menang kok masih ribut soal kecurangan gitu, ini pandangan yang keliru antara kecurangan sama menang kalah itu dua hal yang berbeda, menang kalah itu urusan kami</p>	<p>Foren/Pengkes/Ppp/09:35-11:16</p>

	<p>berdualah 01 02 gitu iya, tapi urusan kecurangan urusan bangsa ini, pemilu yang curang itu meninggalkan luka pada rakyat dan karena itu kami menang atau kalah itu nanti yang menentukan KPU, kita akan ributkan terus kecurangan ini mengapa begitu? karena tadi yang dikatakan pak Said Didu itu dari awal dari mulai DPT mendengar cerita ada polisi yang melakukan pemetaan, menyaksikan sendiri bagaimana polisi berlaku di daerah gitu iya, kemudian tadi cerita PLN membuat mobil jangan lupa bayar listrik tepat waktu tanggal 01 gitu iya, itu rangkaiannya sangat nyata bahwa mendesaian gambar seperti itu bukan tanpa rencana jadi betul-betul ini sesuatu yang kita saksikan dan bedanya begini bedanya 2014 dan sekarang adalah hari ini ketika masyarakat menerima perlakuan yang tidak fer, langsung diviralkan dan itu meresonasi ketempat-tempat yang lain dengan cepet maka menyebar kemana mana.</p>	
2	<p>(Lkn)” Iya kalau kita lihat data–data yang ada iya, hampir semua pengaduan masyarakat yang masuk ke BAWASLU itu diproses iya, karena begini BAWASLU itu ada fungsi investigasi mereka berbeda dengan BAWASLU sebelumnya 2014 dimana mereka tidak dberikan kewenangan investigasi, BAWASLU sekarang ini melalui WA saja kita lapor dia lalu mek melakukan proses iya, wajib BAWASLU melakukan proses semua pengaduan tapi kalau kemudian dia memutuskan bahwa pengaduan itu tidak terbukti, itu sesuai kewenangannya contoh misalnya ya contoh ketika pak Luhut dan ibu Sri Mulyani di Bali dianggap iya pada</p>	Foren/Pengkes/Ppp/16;34-18:30

	<p>pada waktu sidang IMF itu dianggap apa kampanye, dianggap melanggar ya, walaupun tidak ada yang mengadukan BAWASLU tetap melakukan persidangan iya, ibu Sri Mulyani dipanggil, pak Luhur di panggil tapi kemudian apa keputusannya? tidak memenuhi syarat dia itu melanggar ketentuan undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017.</p>	
3	<p>(Ss) "Ini adalah sejarah, kita tidak pernah melihat ada rombongan menteri BUMN agitasi gitu iya, pake tanda-tanda 1 gitu tidak pernah terjadi, baru sekarang ini, kita tidak pernah melihat ada polisi gentayangan dikampung-kampung mematahkan kekuatan dari masing-masing paslon, baru sekarang ini.</p>	Foren/Pengkas.Ppp/49:54-49:56
4	<p>(Ss) "saya mau kaitkan satu lagi kenapa sekarang menjadi begini, masih inget cerita bagaimana orang melakukan yudiaksus sehingga kemudian calon Presiden hanya bisa dua gitu, itu bagian dari yang membuat suasana tidak nyaman gitu, jadi, jadi tidak bisa dilepaskan dari lingkungan gitu.</p>	Foren/Ponpem/Ppp/51:03-58:41
5	<p>(Tgb) "Kita kan sudah dari 1999 artinya ada proses-proses pematangan berpemilu, institusionalnya, sistemnya dan seluruh perangkat yang ada. Hal-hal yang menjadi keberatan itu kan bisa di uji semua. Dan ingat bahwa kita sudah sepakat, dan KPU berulang kali menandakan bahwa yang menjadi ukuran akhirnya adalah rekapitulasi manual. Berjenjang dari bawah sampai kepusat.</p>	Foren/Pengkes/Mhp/10.20-11:19

6	(Ysf)” Oh jadi Provinsi yang masuk disini terus 01 terus , ini pertanyaan gitu, jawab dulu aja, setau saya kalau orang pernah ngikutin Pilpres berkali–kali itu pasti, zaman dulu ditayangkan di Borobudur pasti naiknya naik turun itu begini.	Foren/Ilpeng/Mhp/16:35-16;48
7	(Ysf)” Tapi kan yang diutus bukan pak Jokowi, yang pertama di utus kan bukan pak Jokowi, kalau pak Jokowi dengan pak Prabowo itu sudah kenal lama dan tidak ada masalah, yang menjadikan 2x pak Jokowi jadi Gubernur dan jadi Presiden juga termasuk ada peranannya pak Prabowo, tapi jangan menyederhanakan masalah di saat terjadi proses terus mau terjadi seolah–olah rekonsiliasi sudahlah kalian terima begini-begini jangan, biar aja berproses, gak ada masalah kok, pasti kalau ketemu pasti gak ada masalah kok,	Foren/Ponpem/Mhp/35:33-36:01
8	(Ysf)”Itu sudah pernah terjadi 2014 maka di dalam rekomendasikan kepada BPN agar ke BPN sesegera mungkin, kalau seandainya pintu terbuka dari KPU bisa diselesaikan dengan BPN nantinya temuan-temuan itu bisa diselesaikan, menghadirkan TKN silahkan selesai gak ada masalah. Akan terjadi perbandingan atau kompetisi yang fare. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Kita kembali beraktifitas.	Foren/Pengkes/Mhp/36:43-37:19
9	(Mqd)” Iya, kalau kita lihat memang kurang lebih seperti yang sudah ditemukan dari quickcount ya bahwa 02 itu unggul sangat telak ya di daerah Aceh misalnya itu kalau data realcount yang sudah 72% data yang masuk, itu 02:85%, dan 01:14,9%,	Foren/Pengdat/Mhp/1:06:04-1:07:52

	<p>Sumatera Barat itu 86% untuk 02:13% untuk 01, kemudian Jawa Barat ini 02:56%, dan 01:43%, kemudian untuk Sumatera Selatan 59% Prabowo–Sandie dan 40% untuk Jokowi–Amien itu yang unggul telak–telak iya untuk 02, untuk NTB ya Tuan Guru Bajang ini kami laporkan data 68% masuk 02 : 67% pak ya 67%, jadi kontribusi NTB kepada 02 sangat besar pak iya 67% terima kasih pak Yusuf kepada pak Tuan Guru . 01:32% saja, jadi kalau dibandingkan dengan 2014 kebetulan saya juga pegang data 2014 ini justru 02 semakin kuat, dulu pak sorry ada lebih baik sedikit lah iya, dulu 2014 di Nusa Tenggara Barat Pak Prabowo dapat 72% sekarang 67% tapi ini data belum 100% iya, masih 68%, kemudian yang 01nya unggul telak adalah di Bali itu angkanya–angkanya 91%, kemudian di Nusa Tenggara Timur 88%, tetapi walaupun kuncinya saya lihat sementara ini justru di Jawa Timur dan di Jawa Tengah ya, Jawa Timur keunggulan 01: 66%, dan di Jawa Tengah 77%,</p>	
10	<p>(10.(Mqd)”Sebetulnya kalau setiap pemilu lalu kemudian ada katakanlah kontestasi mengenai proses mengenai hasil itu memang selalu terjadi, dan dugaan saya memang iya 2019 ini pun juga setelah ditetapkan oleh KPU akan dibawa kepada Mahkamah Konstitusi cuman memang menuju kepenetapan tahun ini agak lebih dinamis dibandingkan dengan tahun 2014 lalu. Mungkin karena ditahun 2014 tidak ada pak Yusuf Martak, sekarang ada pak Yusuf Martak jadi kemungkinan kira–kira begitu, jadi variabel–variabel 411, 212, kemungkinan Istim’a 1, Istim’a 2, Istim’a 3itu tahun 2014 tidak ada cuman eleman–</p>	Foren/Pengkes/Mhp/1:20:02-1:20:46

	elemen atau isu–isu keagamaan ini agak lebih menonjol di tahun 2019, dibandingkan dengan 2014 yang lalu.	
11	(Mqd)” Menurut saya itu sinyal yang sangat menarik iya, bahwa barangkali yang diinginkan untuk datang kepada 02 adalah mereka–mereka yang memiliki simbol– simbol keagamaan, atau keulamaan katakanlah seperti Tuan Guru Bajang begitu, nah mungkinlah mungkin itu juga yang membedakan antara 2014 dengan 2019, sorry 2014 dengan 2019 karena unsur ata elemen keagamaan 2019 ini lebih kental maka yang seperti Tuan Guru Bajang akan lebih diterima, lebih komunikatif dibandingkan dengan yang 2014 lalu,	Forem/Ponpem/Mhp/1:21:01-1:21:28
12	(Egl)” Oh belum,pada waktu tahun 2013 tentang pemilu serentak itu, 2013 itu 6 tahun 3 bulan yang lalu, pada waktu kami mengajukan 10 januari 2013 belum ada yang mengajukan soal pemilu serentak,	Foren/Ilpeng/Pmn/1:24:21-1:24:32
13	13.(Egl)”Dipersidangan yang panjangnya 1 tahun itu, karena di kabulkan, dibacakan pak Hamdan Zulfa kemudian 23 januari 2014, 1 tahun lebih hadir disitu para ahli–ahli terkait pemerintahan hadir DPR hadir KPU hadir dan semua yang terkait dari seluruh interaksi itulah akhirnya di putuskan oleh 9 hakim MK, dengan perbandingan 8 lawan 1 bahwa ini memang kehendak undang–undang dasar kita.	Foren/Pengkas/Pmn/!:24:46-1:26:28
14	(Egl)” 23 januari 2014 sampai jadi ini bukan tiba–tiba dari 23 januari 2014 tiba–tiba besoknya langsung kita di pemilu di 17	Foren/Ilpeng/Pmn/1:26:30-1:26:42

	april 2019 , ada 5 tahun 2 bulan persiapannya.	
15	(Egl)” Iya, jadi tadi sudah iya bagian awal mbak Rosi terima kasih pemirsa bahwa itu adalah kehendak undng–undang dasar, siapa pun mahkamah konstitusinya walaupun 81 harus memutuskan demikian, dan kami hanya menyampaikan kehendak konstitusional, nah kemudian ada bagian manajemen ada 5 tahun 3 bulan untuk melaksanakannya, pada awalnya kami sudah berfikir kita harus inget ya, kami basisnya komunikasi politik, kami sudah membayangkan yang perlu dipotong melalui pemerintah serentak ini sebetulnya adalah presidential threhold, karena pelan-pelan kenapa itu penting karena itu akan menyediakan origarki dimana ada sekelompok orang dengan basis kapital, kekuasaan, atau elite kecil dipartai politik yang menentukan hanya sebagian kecil orang yang bisa maju untuk jadi calon presiden, 2013 kami sudah membayangkan kalau betul nanti ini hanya 2 saja calon presidennya di 2014 apalagi seterusnya seperti itu, maka bangsa ini sebetulnya sudah akan dijadikan bangsa yang terbelah dan diumpankan ke mulut yang kami sebut perusak peradaban , yaitu walaupun banyak fungsi positif lainnya misalnya media sosial jadi kami sudah bayangkan dari 2013, ini kalau kita punya dua calon presiden saja di 2014 ditambah lagi, diulang di 2019 maka bangsa ini kan terbelah dan seperti diumpankan ke mulut singa yang mengaga iya yang disebut media sosial. Sehngga saya boleh mengatakan begini 5 tahun 2 bulan itu sebagian besar waktu kita jadi waktu KPU,	Foren/Pengkes/Pmn/1:30:11-1:32:17

	BAWASLU, kepolisian, politisi , pengamat dan semua yang lain habis tersisa untuk melawan hoax, ujaran penecemaran, ujaran apalagi kebencian dan lain-lain..	
16	(Egl)” Sebetulnya gini, iya setuju jadi gini kalau kita bisa tetap sebagai bangsa yang beradab dngan peradaban kita yang unggul, 5 tahun 2 bulan itu kita bisa duduk bersama karena sangat banyak ide-ide gemilang kemudian misalnya pada halaman 44 pengajuan kami judicial review itu bisa dicek saja ini di ambil dari websitenya mahkamah konstitusi Didik Supriyanto sudah mengatakan pemilu serentak yang mana jadi artinya tetap pemilu serentak dengan presidential therlodnya tidak ada atau nol tapi dia bisa dipisah dua pemilu nasional serentak memilih presiden, DPR, dan DPD, serta pemilu daerah serentak memilih kepal daerah DPRD 1 dan DPRD 2 jadi ada usulan begitu. Pada 1 desember 2015 saya berbicara pada waktu kementrian dalam negeri melururkan buku dasar-dasar hukum pemilu atau pilkada serentak, saya sampaikan ide yang sama jadi kita bisa pisah pemilu nasinal serentak, Presiden, DPR, DPD serta pemilu daerah serentak, jadi itu 2014 dan 2015 sudah kita usulkan tapi kita seperti tidak punya waktu lagi untuk dengan peradaban unggul kita berbicara dengan baik, semuanya, semuanya sudah penuh dengan kebencian.	Foren/Ilpeng/Pmn1:33:07-1:34:30
17	(Egl MK mengatakan ini harus 1 hari dengan 5 kotak, coba sama-sama kita	Foren/Ilpeng/Pmn/1:37:06-1:38:45

	<p>perbandingkan dengan pemilu 2014, di 2014 rakyat kita sudah terbiasa, terbiasa dengan 4 kotak ya, sekarang hanya ditambah 1 kotak. Fitra asil yang mengatakan begini rakyat kita sebetulnya sudah terbiasa dengan 4 kotak, sekarang hanya ditambah 1 kotak yang tidak serumit legislatif ini kan cuman Jokowi, Prabowo, ngitungnya juga tidak serumit legislatif bahkan sebetulnya dia sudah imbang Rosi yaitu yang dulu di TPS 500 sekarang dijadikan 300, jadi katakanlah kalau dihitung beban kerjanya harusnya sama pelan-pelan ini rumus matematika, dulu 4 kotak 500 orang 1 TPS, sekarang 5 kotak dengan penambah 1 kertas suara pemilu presiden yang tidak serumit legislatif, sudah setengah peserta pemilihan tinggal setengah pertanyaanya kenapa kok ada tekanan psikis yang sangat besar sampai ada ketua KPS yang gantung diri, ketua KPS gantung diri, yang kedua ini lebih penting teman-teman KPU ini sekarang kan seakan-akan kalau kita ngomong sesuatu delegitimasi karena ketajaman antar dua kubuh ini, saya selalu mengatakan dibanyak stasiun televisi wish still love you KPU kecuali dalam satu hal ini yaitu mohon maaf teman-teman KPU itu melakukan simulasi di 300 TPS.</p>	
18	<p>(Egl)” Kalau, saya ingin mengatakan mula-mula kita harus ini evaluasi betul ya,kan ada logika yang tadi pemilu 2014 dengan segala rumus matematiknya sebetulnya sama dengan 2019 karena jumlah peserta di TPS dikurangi setengahnya, setengahnya hanya menambah 1 kotak suara muncul pertanyaan lagi pada waktu simulasi tidak</p>	Foren/Pengkes/Pmn/1:41:39-1:42:26

	terdeteksi sama sekali ada kelelahan yang menyebabkan kematian akut. Jadi apa ini yang menyebabkan kematian?.	
19	(Egl)” Jadi tekanan sesungguhnya, jadi lagi–lagi ini menjadikan untuk dibicarakan tapi bukan tekanan fisiknya ini saya yakin, ada tekanan mental yang luar biasa karena 2014 tidak terjadi. Disimulasi tidak terjadi , tapi pada hari H kenyataanya adalah, tapi begini saya setuju bahwa kita harus mencari jalan keluar terbaik kedepan, tapi soal keserentakan ini itu ada dioriginal intern dari undang–undang dasar kita.	Foren/Ponpem/Pmn/1:42:32-1:43:00
20	(Egl)” Begini saya ingin mengatakan saya tidak akan menjadi orang pengecut apalagi curang, dan lempar batu sembunyi tangan mari kita buka ini mau dalam seminar ilmiah nasional boleh, di DPR ayo, kalau ada pemeriksaan polisi pun siap, tapi yang saya katakan gagasan itu adalah gagasan konstitusi, bahkan banyak sekali dulu yang bersorak dan diberbagai stasiun televisi mengatakan ini kemenangan rakyat juga disamping saya ya,	Foren/Pengkes/Pmn/1:43:26-1:43:53
21	(Egl)”Saya rasa tanggung jawab moral kami iya, kami tuh yang pengaju bukan yang para hakim, para hakim punya tanggung jawab moral sendiri adalah mari sama–sama kita periksa dibagian mana kesalahanya tanpa bermaksud menyalah–nyalahkan apalagi sudah ada korban yang sangat emm mengganggu perasaan ini, tapi sama–sama kita ke depan supaya jangan jadi bangsa yang terbelah begitu, lagi–lagi	Foren/Ilpeng/Pmn/1:48:08-1:48:59

	<p>saya merindukan pemilu presiden 2004 dimana calon presidennya ada 5 dan kita tidak langsung, ini sudah sejak 2014 lalu disambung ke 2019 apapun yang kita bicarakan ini langsung akan dituduhni cebong, apa kampret sampai malam ini loh masih ini oh ini E-G kampret ini pasti, karena minta supaya apa namanya diusut dan lebih penting lagi saya juga bingung ini Rosi, saya betul-betul bingung para pemirsa tiba-tiba ada 22 negara itu memuji pelaksanaan pemilu Indonesia, kata pak Jokowi, yang dipuji apanya?</p>	
--	---	--

## 4.2 Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini data yang digunakan sesuai dengan urutan apa yang dibahas dan menyesuaikan dengan apa yang telah tersusun sesuai dengan judul video oleh peneliti. Penelitian ini dalam membahas memilih data secara berurutan sesuai kategori yang sama, contohnya memilih data bentuk Retorika Demonstratif memilih data no 13 dan 25 dan seterusnya.

### 4.2.1. Bentuk Retorika Demonstratif

Retorika Demonstratif, berfokus pada Epikdeiktik, berkaitan dengan wacana pujian dan tuduhan untuk memperkuat sifat baik atau buruk seseorang, lembaga maupun gagasan. Pidato jenis ini bertujuan memuji, menghormati atau bahkan sebaliknya, Retorika Demonstratif lebih memfokuskan kepada wacana memuji atau menistakan sifat seseorang, retorika lebih dikenal dengan tempat yang tepat, dan waktu yang tepat agar lebih efektif untuk mengucapkan kata-kata yang lebih mengesankan, retorika juga memfokuskan seseorang untuk tuturan notasi yang jelas, singkat dan efektif agar yang menyimaknya paham dengan yang disampaikannya. Retorika Demonstratif berfokus berkaitan dengan pujian maupun tuduhan untuk memperkuat sifat baik dan sifat buruk seseorang, contohnya kampanye politik penuh dengan retorika demonstratif dari pihak lain menantang kualifikasi pihak lain, sedangkan dukungan editorial oleh surat kabar, majalah,

televisi, dan radio juga menegaskan garis demonstratif, memperkuat sifat-sifat positif kandidat yang didukung dan menegaskan sifat-sifat menentang lawannya.

Berikut adalah contoh data yang mengandung bentuk retorika demonstratif sebagai berikut :

13. (Lkn)” Saya juga ingin menyatakan seperti itu, pak Sudirman menyatakan bahwa sekarang terbentuk publik tidak percaya KPU itu darimana iya? apa lagi berita soal atau membangun frame ketidakpercayaan kepada KPU itu kan sudah jauh–jauh hari sebelum hari H, sebelum masa kampanye sudah dibangun ketidakpercayaan, kita masa kampanye menyatakan DPT bermasalah dan lain sebagainya.

Demon/Ponpem/Ppp/39:09-39:52

Tuturan yang bernomor 13 tersebut merupakan tuturan Lukman Edy yang di ambil di *youtube* pada acara Rosi di Kompas Tv yang bertema Politik Pasca Pemilu pada tanggal 25 April 2019. Tuturan tersebut termasuk bentuk retorika demonstratif karena pada tuturan tersebut Sudirman Said menjelaskan bahwa KPU tidak lagi di percaya oleh masyarakat, kemudian di bantah oleh Lukman Edy bahwa berita soal ketidakpercayaan kepada KPU sudah dibangun sebelum masa kampanye. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan pada tuturan tersebut dikategorikan demonstratif karena ujaran Lukman Edy menuduh bahwa DPT sudah bermasalah sebelum masa kampanye.

Data berikut ini juga termasuk bentuk retorika demonstratif dalam acara Rosi di kompas Tv yang diambil dari *youtube* pada tanggal 02 Mei 2019 dengan tema yang berjudul Menunggu Hasil Pemilu.

25. (Ysf)“Begini pertama saya mau memberikan pencerahan tolong jangan naif, kan ulama yang berisim’a dengan kami kan satu, dua, dan tiga, jangan sekali–kali dikecilkan bahwa keulamaannya tidak kredibel, ada yang bilang abal–abal, ada yang bilang dianggap segala, saya mau mengasih contoh begini, kalau ada satu ruangan disitu ada pelaku–pelaku melakukan kecurangan, pasti dia merasa aman, kami cctv, tolong dicatat semua perlakuan kecurangan datanya sudah ada dikami semua.

Demon/Ilpeng/Mhp/07:44-08.22

Tuturan nomor 25 termasuk tuturan Bentuk Retorika Demonstratif, hal tersebut dibuktikan dengan kalimat “*Begini pertama saya mau memberikan pencerahan tolong jangan naif, kan ulama yang berisim’a dengan kami kan satu,*

*dua, dan tiga, jangan sekali-kali dicekik bahwa keulamaannya tidak kredibel.* Tuturan tersebut menandakan Yusuf Muhammad Martak menjelaskan bahwa dalam terjadinya pelaksanaan Istim'a ulama terjadi secara berurutan dengan urutan Istim'a Ulama satu, dua sampai dengan Istim'a ketiga, dan jangan sekali-kali menganggap bahwa keulamaan kami tidak kredibel dan abal-abal, karena dalam terjadinya Istim'a ketiga berkumpulnya ulama-ulama dalam musyawarah tersebut untuk membahas kecurangan-kecurangan data yang sudah ditemukan oleh BPN. dan ulama bersatu melawan kecurangan-kecurangan tersebut.

Data berikut juga termasuk dalam Bentuk Retorika Demonstratif dalam acara Rosi yang diambil *youtube* pada tanggal 02 Mei 2019 yang bertema Menunggu Hasil Pemilu.

26 (Ysf)“Tidak di GNPf, di BPN,dan GNPf juga kenapa di GNPf juga ada organisasi relawan yang namanya koppaSandi, disitu koppaSandi mempunyai data-data temuan yang banyak, disampaikan dihimbau agar ini ditindak tapi kasat mata kita tidak boleh membodohi rakyat, aparat ada situ dan melindungi, yang selanjutnya pembiaran ada pada para pemerintah, selaku presiden tidak pernah melakukan himbuan secara tegas, jangan ada kecurangan, hindari kecurangan harus jujur.

Demon/Ilpeng/Mhp/08:23-09.27

Tuturan nomor 26 termasuk tuturan bentuk Retorika Demonstratif karena pada tuturan tersebut Yusuf Muhammad Martak menjelaskan bahwa di BPN (Badan Pemenangan Nasional), di GNPf (gerakan nasional pengawal fatwa ulama) merupakan relawan KoppaSandi (ketua komando ulama pemenangan Prabowo-Sandi) yang menemukan data-data teman yang banyak dan dihimbau agar ditindak, dan kita tidak boleh membodohi rakyat, dan aparat yang diharapkan untuk melindungi, tetapi kenyataannya pembiaran pada pemerintah selaku presiden hanya diam saja dan tidak menghimbau dengan tegas agar tidak melakukan kecurangan, melakukannya dengan kejujuran.

Berdasarkan pemaparan tersebut disimpulkan bahwa tuturan tersebut termasuk bentuk retorika demonstratif karena Yusuf Muhammad Martak menyimpulkan bahwa Presiden melakukan kecurangan dengan bukti data-data yang telah ditemukan BPN, GNPf dan KoppaSandi.

Berikut ini bentuk Retorika Demonstratif dalam acara Rosi Kompas Tv yang diambil dari *youtube* pada tanggal 02 Mei 2019 yang bertema Menunggu Hasil Pemilu.

27.(Ysf)“Iya karena kita kontisional tidak melanggar hukum, tidak melanggar undang-undang, kita beristim’a, kita berkumpul, kita membicarakan, kalau tidak hadir di dalam Istim’a jangan menyikapi Istim’a dari luar, justru kami ini yang justru diberikan apresiasi bisa mereda kegelisahan masyarakat, baik masyarakat yang mana, tapi itulah yang kami sampaikan semuanya di dalam istim’a, yang alhamdulillah disepakati, mau meredam semuanya.

Demon/Ilpeng/Mhp/09:30-09:55

Tuturan nomor 27 termasuk dalam bentuk Retorika Demonstratif karena pada tuturan Yusuf Muhammad Martak menjelaskan bahwa karena BPN tidak melakukan pelanggaran hukum, tidak melanggar undang-undang, karena BPN melakukan Istim’a ulama yang bertujuan mengumpulkan para ulama dan membicarakan tentang kecurangan-kecurangan, dan untuk yang tidak hadir diistim’a ulama jangan mengambil keputusan yang hanya melihat dari luar, justru BPN diberikan apresiasi karena meredakan kegelisahan masyarakat yang resah dengan kecurangan-kecurangan yang ada.

Bentuk Retorika Demonstratif dalam acara Rosi Kompas Tv yang diambil dari *youtube* pada tanggal 02 Mei 2019 yang bertema Menunggu Hasil Pemilu.

28.(Tgb)”Menurut saya perlu diklarifikasi iya antara misalnya yang paling banyak dibicarakan kan salah input, ternyata kedua belah pihak bermasalah artinya ada yang menguntungkan ini, ada yang menuntungkan itu, ada hal lain yang menyangkut indikasi kecurigaan, ketidak netralan aparat ya buktinya apa? kan semuanya pada akhirnya apa buktinya ?

Demon/Ilpeng/Mhp/12:27-12:51

Tuturan nomor 28 termasuk dalam bentuk Retorika Demonstratif karena pada tuturan Tuan Guru Bajang menjelaskan bahwa permasalahan yang sedang banyak diresahkan karena salah input dari salah satu pihak, ternyata kedua belah pihak bermasalah yang artinya menguntungkan calon Presiden 01 dan calon Presiden 02, dan yang menyebabkan indikasi kecurigaan, dan tidak netralnya aparat yang bisa dibuktikan karena semua harus bisa dibuktikan.

#### 4.2.2 Bentuk Retorika Deliberativ

Retorika Deliberativ, yang bermaksud untuk menentukan tindakan yang harus atau tidak boleh dilakukan khalayak. Dapat disimpulkan bahwa pada teori Retorika klasik, kemampuan retorika lebih banyak dipraktekkan pada bidang hukum serta kepentingan politik. Retorika Deliberativ lebih difokuskan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dan tindakan yang tidak boleh dilakukn oleh masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa Retorika Deliberativ lebih mementingkan politik.

Berikut adalah contoh yang mengandung Bentuk Retorika Deliberativ sebagai berikut:

1.(Lkn)” BUMN itu tidak boleh ditim kampanye nasional tidak ada satu pun pejabat BUMN yang sebagai masuk sebagai tim, bukan saja sebagai direksi bahkan komisaris sekali pun mereka tidak boleh iya.,dalam tim kampanye.

Deli/Pengkes/Ppp/07:54-08:07

Tuturan nomor 1 Bentuk Retorika Deliberativ dalam acara Rosi yang diambil dari *youtube* pada tanggal 25 April 2019 yang bertema Politik Pasca Pemilu berikut tuturan bentuk retorika deliberativ termasuk dalam bentuk retorika deliberativ karena pada tuturan Lukman Edy menjelaskan bahwa BUMN tidak boleh menjadi tim kampanye nasional, karena BUMN tidak boleh mengikuti kampanye terselubung dan bahkan anggota BUMN kedudukan tertinggi sekali pun tidak boleh mengikuti tim kampanye.

Berikut data dalam bentuk Retorika Deliberativ dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil *youtube* pada tanggal 25 April 2019 yang bertema Politik Pasca Pemilu.

2.(Arf)” Iya,ada banyak pikiran sebetulnya di KPU, yang pertama sempat terfikir kami ingin mengundang pak Jokowi dan pak Prabowo melihat situng di kantor KPU mungkin kalau ada kesempatan saya fikir ini akan bakal setuju, itu cara yang mungkin di tidak terlalu penting bagi orang, tapi bagi KPU penting.

Tuturan nomor 2 termasuk dalam bentuk Retorika Deliberativ karena tuturan tersebut Arief Budiman menjelaskan bahwa KPU ingin mengundang pak

Jokowi dan pak Prabowo melihat situng di kantor KPU yang mungkin dianggap oleh masyarakat tidak penting, namun KPU beranggapan bahwa itu sangat penting, agar calon Presiden 01 dan calon Presiden 02 saling setuju dengan perhitungan KPU. Tuturan tersebut mengandung bentuk retorika deliberative karena Arif selaku ketua KPU melakukan tindakan dengan cara mengundang Jokowi dan Prabowo untuk melihat perhitungan suara pemilu pilihan presiden tahun 2019.

Berikut adalah data yang mengandung bentuk Retorika Deliberativ dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil *youtube* pada tanggal 02 Mei 2019 yang bertema Menunggu Hasil Pemilu.

17. (Ysf) "Iya, bukan mendesak iya, mendesak melalui BPN agar BPN mendesak KPU, itu udah pasti mbak, udah dipelajari semua dari sisi hukumnya.

Deli/Pengkes/Mhp/38:51-38:59

Tuturan nomor 17 termasuk dalam bentuk retorika deliberativ karena tuturan tersebut menjelaskan bahwa Yusuf Muhammad Martak dari BPN mendesak KPU agar menindak lanjuti pasal-pasal pemilu. Yusuf selaku pendukung calon presiden 02 mengirim surat ke BPN yang berisi tentang pendesakan KPU terkait hasil perhitungan pemilu, akan tetapi BPN mengirim surat waktu menemui KPU kan tidak bilang ini dapat surat dari GNPF kan tidak, kan beda konteksnya sudah.

Berikut adalah data yang mengandung bentuk Retorika Deliberativ dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil *youtube* pada tanggal 02 Mei 2019 yang bertema Menunggu Hasil Pemilu.

18. (Ysf) " Kami tidak pernah mau menunggu keputusan akhir KPU tanggal 22, kami akan berjuang semaksimal mungkin agar KPU dapat meverifikasi data-data temuan dari kami, karena kalau sudah diputuskan tanggal 22 selesai, tamat harus ke MK.

Deli/Pengkes/Mhp/42:17-43:04

Tuturan nomor 18 termasuk dalam bentuk retorika deliberativ karena tuturan tersebut menjelaskan bahwa BPN tidak pernah mau menunggu keputusan akhir dari KPU tanggal 22 Mei 2019 nanti, BPN akan berjuang semaksimal mungkin agar KPU mau menerima data-data temuan dari BPN, karena MK merupakan keputusan terakhir yang akan memutuskan hasil kemenangan pemilu tanggal 22 mei.

Berikut adalah data yang mengandung bentuk Retorika Deliberativ dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil *youtube* pada tanggal 02 Mei 2019 yang bertema Menunggu Hasil Pemilu

21.(Ysf)” Kalau kita bisa dari awal kan lebih bagus daripada kita menunggu nanti nasib kita hanya ditentukan dengan keputusan sepihak. Kalau ditemukan kecurangan–kecurangan masak kita mesti diem terus sampai tanggal 22. Boleh dong kita menanyakan MK, ada temuan ini–ini kroscek dong, baik yang tadi seperti Tuan Guru bilang dari mulai BAWASLU, sampe ke KPU semua.

Deli/Pengkes/Mhp/56.30-56:53

Tuturan nomor 21 termasuk dalam bentuk retorika deliberativ karena tuturan tersebut menjelaskan bahwa Yusuf Muhammad Martak daripada menunggu hasil keputusan sepihak, kalau sudah ditemukan kecurangan-kecurangan kita tidak boleh diam saja sampai tanggal 22 Mei. Kita ingin memberi tahu MK bahwa temuan-temuan data ini harus segera dikroscek mulai dari BAWASLU dan KPU.

#### **4.2.3 Bentuk Retorika Forensik**

Bentuk retorika forensik, berfokus pada sifat yuridis dan mempersoalkan masa lalu untuk menentukan benar atau salah. Dapat disimpulkan bahwa bentuk retorika forensi membahas persoalan masa lalu yang dianggap kebenarannya atau menyangkal kebenarannya.

Berikut adalah contoh yang mengandung bentuk retorika forensik sebagai berikut:

3.(Ss)” Ini adalah sejarah, kita tidak pernah melihat ada rombongan menteri BUMN agitasi gitu iya, pake tanda–tanda 1 gitu tidak pernah terjadi, baru sekarang ini, kita tidak pernah melihat ada polisi gentayangan dikampung–kampung mematahkan kekuatan dari masing-masing paslon, baru sekarang ini.

Foren/Pengkas.Ppp/49:54-49:56

Berikut adalah data yang mengandung bentuk retorika forensik dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil *youtube* pada tanggal 25 April 2019 yang bertema Politik Pasca Pemilu.

Tuturan nomor 3 termasuk dalam bentuk retorika forensik karena tuturan tersebut menjelaskan bahwa Sudirman Said dalam sejarah kampanye pemilu, kita tidak melihat ada rombongan menteri BUMN agitasi gitu iya, pakai tanda-tanda nomor 1 itu tidak pernah terjadi baru sekarang dalam pemilihan presiden 2019, melihat aparat kepolisian keliling kampung-kampung untuk mematahkan tujuan dari masing-masing calon presiden baru sekarang ini terjadi seperti itu

Berikut adalah data yang mengandung bentuk retorika forensik dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil *youtube* pada tanggal 25 April 2019 yang bertema Menunggu Hasil Pemilu.

5. (Tgb)” Kita kan sudah dari 1999 artinya ada proses–proses pematangan berpemilu, institusionalnya, sistemnya dan seluruh perangkat yang ada. Hal–hal yang menjadi keberatan itu kan bisa di uji semua. Dan ingat bahwa kita sudah sepakat, dan KPU berulang kali menandakan bahwa yang menjadi ukuran akhirnya adalah rekapitulasi manual. Berjenjang dari bawah sampai kepusat.

Foren/Pengkes/Mhp/10.20-11:19

Tuturan nomor 5 termasuk dalam bentuk retorika forensik karena tuturan tersebut menjelaskan bahwa Tuan Guru Bajang pematangan berpemilu, institusionalnya, sistem dan seluruh perangkat yang ada telah melalui proses-proses pada tahun 1999 yang lalu, kemudian keputusan yang dianggap keberatan itu, bisa di uji lagi semua, KPU berulang kali juga menjelaskan bahwa ukuran hasilnya rekapitulasi manual yang berjenjang dari bawah ke KPU pusat.

Berikut adalah data yang mengandung bentuk retorika forensik dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil *youtube* pada tanggal 25 April 2019 yang bertema Menunggu Hasil Pemilu.

8.(Ysf)”Itu sudah pernah terjadi 2014 maka di dalam rekomendasikan kepada BPN agar ke BPN sesegera mungkin, kalau seandainya pintu terbuka dari KPU bisa diselesaikan dengan BPN nantinya temuan-temuan itu bisa diselesaikan, menghadirkan TKN silahkan selesai gak ada masalah. Akan terjadi per pertandingan atau kompetisi yang fare. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Kita kembali beraktifitas.

Foren/Pengkes/Mhp/36:43-37:19

Tuturan nomor 8 termasuk dalam bentuk retorika forensik karena tuturan tersebut menjelaskan bahwa Yusuf Muhammad Martak pada tahun 2014 sudah pernah terjadi didalam rekomendasi kepada BPN agar BPN menemui KPU untuk menyelesaikan temuan-temuan. Karena Yusuf Muhammad Martak mengupas tahun 2014 lalu, yang termasuk dalam bentuk retorika forensik.

Berikut adalah data yang mengandung bentuk retorika forensik dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil *youtube* pada tanggal 25 April 2019 yang bertema Menunggu Hasil Pemilu.

10.(Mqd)”Sebetulnya kalau setiap pemilu lalu kemudian ada katakanlah kontestasi mengenai proses mengenai hasil itu memang selalu terjadi, dan dugaan saya memang iya 2019 ini pun juga setelah ditetapkan oleh KPU akan dibawa kepada Mahkamah Konstitusi cuman memang menuju kepenetapan tahun ini agak lebih dinamis dibandingkan dengan tahun 2014 lalu. Mungkin karena ditahun 2014 tidak ada pak Yusuf Martak, sekarang ada pak Yusuf Martak jadi kemungkinan kira–kira begitu, jadi

variabel–variabel 411, 212, kemungkinan Istim’a 1, Istim’a 2, Istim’a 3 itu tahun 2014 tidak ada cuman eleman–eleman atau isu–isu keagamaan ini agak lebih menonjol di tahun 2019, dibandingkan dengan 2014 yang lalu.

Foren/Pengkes/Mhp/1:20:02-1:20:46

Tuturan nomor 10 termasuk dalam bentuk retorika forensik karena tuturan tersebut menjelaskan bahwa M. Qodari memang 2019 yang telah ditetapkan KPU akan dibawa oleh Mahkamah Konstitusi menuju keputusannya agak lebih tertata dibanding dengan 2014 yang lalu, karena di tahun 2014 tidak ada pak Yusuf Martak, sekarang pada tahun 2019 ada pak Yusuf Martak yang menjadikan kemungkinan variabel–variabel 411, 212, kemungkinan Istim’a 1, Istim’a 2, Istim’a 3 itu tahun 2014 tidak ada cuman eleman–eleman atau isu–isu keagamaan ini agak lebih menonjol di tahun 2019, dibandingkan dengan 2014 yang lalu.

Berikut adalah data yang mengandung bentuk retorika forensik dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil *youtube* pada tanggal 09 Mei 2019 yang bertema Pemilu Menelan Nyawa .

13.(Egl)”Dipersidangan yang panjangnya 1 tahun itu, karena di kabulkan, dibacakan pak Hamdan Zulfa kemudian 23 januari 2014, 1 tahun lebih hadir disitu para ahli–ahli terkait pemerintahan hadir DPR hadir KPU hadir dan semua yang terkait dari seluruh interaksi itulah akhirnya di putuskan oleh 9 hakim MK, dengan perbandingan 8 lawan 1 bahwa ini memang kehendak undang–undang dasar kita.

Foren/Pengkas/Pmn/! :24:46-1:26:28

Tuturan nomor 13 termasuk dalam bentuk retorika forensik karena tuturan tersebut menjelaskan bahwa Effendi Gozali sebelum melakukan pemilu serentak tahun 2019, yang telah disidangkan terlebih dahulu pada 23 Januari 2014, yang dihadiri para ahli–ahli terkait pemerintahan yakni DPR, KPU, dan semua yang terkait dengan interaksi itu kemudian diputuskan oleh 9 hakim MK dengan perbandingan 8 lawan 1 sesuai dengan undang–undang dasar kita.

#### **4.3.1 Fungsi retorika sebagai komunikasi persuasif.**

Retorika dikenal sebagai komunikasi persuasif, yang memengaruhi minat atau perhatian masyarakat, seperti iklan, kampanye agar memilih pilihan mereka. Dapat disimpulkan bahwa retorika adalah minat yang memengaruhi perhatian masyarakat. Untuk menarik plihan masyarakat agar satu suara dengannya.

Berikut adalah contoh yang mengandung fungsi retorika sebagai komunikasi persuasif sebagai berikut.

50.(Tgb)”Iya jelas, karena memang yang hadir di perhelatan politik yang ditajukkan Istim’a Ulama kan tokoh–tokoh agama yang memang kuat

mendukung pasangan 02, iya menjadi jurkam masuk dalam struktur BPN bahkan, adapun yang tidak satu aspirasi tentu tidak terwakili dsitu dan saya ingin sampaikan bahwa semangatnya yuk kita bicara berjumpa satu sama lain dan untuk keuntungan siapa juga kita mau polarisasi terus.

Demon/Komper/Mhp/40:21-40:54

Berikut adalah data yang mengandung bentuk retorika forensik dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil youtube pada tanggal 02 Mei 2019 yang bertema Menunggu Hasil Pemilu.

Tuturan nomor 50 termasuk dalam fungsi retorika sebagai komunikasi persuasif karena tuturan tersebut menjelaskan bahwa Tuan Guru Bajang mengajak pendukung kuat pasangan 02 yang tidak satu aspirasi dan tidak terwakili disitu, ingin menyampaikan untuk berjumpa satu sama lain dengan keuntungan agar kita tidak mengalami pertentangan terus antara pendukung presiden 01 dan pendukung presiden 02.

Berikut adalah data yang mengandung fungsi retorika sebagai komunikasi persuasif dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil youtube pada tanggal 09 Mei 2019 yang bertema Pemilu Menelan Nyawa.

66.(Egl)''Bahkan,ada ide gemilang betul dari teman-teman PURSAKO atau pusat kajian konstitusi di UNAN yang mengatakan begini pemilu serentak tanpa presiden therlod itu sebetulnya bisa saja pencalonannya yang serentak untuk menghindari oligarki tadi iya kan, untuk mencegah bangsa yang terbelah tapi pelaksanaannya nanti bisa tetep DPR dulu, baru pemilu Presiden.

Demon/Komper/Pmn/1:34:34-1:35:00

Tuturan nomor 66 termasuk dalam fungsi retorika sebagai komunikasi persuasif karena tuturan tersebut menjelaskan bahwa Effendy Gozali pemilu serentak 2019 diadakan tanpa presiden therlod dilakukan dan pencalonannya yang serentak itu agar terhindar dari oligarki, untuk menjaga bangsa supaya tidak terbelah, dan pelaksanaannya yang mendahulukan DPR kemudian pemilihan presiden agar tidak ricuh dan aman.

#### **4.3.2 Fungsi Retorika Sebagai Penghubung Kekuasaan Tertinggi**

Retorika selalu berkaitan dengan kewenangan tertinggi, seperti yang sedang berkuasa saja yang di izinkan memberikan pendapat dalam berdiskusi, bagaimana seseorang petinggi jabatan memberikan hak suaranya sangat di

butuhkan untuk mencapai mufakat. Dapat disimpulkan bahwa retorika sebagai pehubung kekuasaan tertinggi, selalu yang memiliki seseorang petinggi jabatan yang berhak memberikan suaranya yang sangat di butuhkan untuk mengambil keputusan terakhir.

Berikut adalah contoh yang mengandung fungsi retorika sebagai pehubung kekuasaan tertinggi sebagai berikut:

4.(Ss)” Sebetulnya sih saya ingin mengoreksi yang dikatakan bung Arya tadi sebetulnya proses itu terjadi , pelaporan terjadi 2 pekan lalu terus minggu lalu kita menyampaikan laporan 1.200 pelanggaran atau kecurangan itu sudah disampaikan dan kita juga bersiet kepada BAWASLU misalnya kejadian ini Malaysia langsung difolapikan dihentikan kemudian diminta pemilu ulang segala macem, Surabaya diminta hitung ulang jadi cukup responsiflah dan diberbagai spot itu yang kemudian kita melihatnya ini bisa jadi apa masif karena diseantero negeri ada kejadian itu.

Demon/Pengkes/Ppp/18:43-20:32

Berikut adalah data yang mengandung fungsi retorika sebagai pehubung kekuasaan tertinggi dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil youtube pada tanggal 25 April 2019 yang bertema Politik Pasca Pemilu.

Tuturan nomor 4 termasuk dalam fungsi retorika sebagai pehubung kekuasaan tertinggi karena tuturan tersebut menjelaskan bahwa Sudirman Said selaku Sudirman Said (Direktur Materi Debat pendukung 02),ingin menyampaikan penemuan1.200 laporan pelanggaran yang ingin diberikan kepada BAWASLU, karena BAWASLU adalah kekuasaan tertinggi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

Berikut adalah data yang mengandung fungsi retorika sebagai pehubung kekuasaan tertinggi dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil youtube pada tanggal 25 April 2019 yang bertema Politik Pasca Pemilu.

6.(Arf)” Iya kalau KPU kemudian mengupload yang mohon maaf ini iya, ini yang merugikan 01 nanti dikira kita dukung 01, kita mengupload yang merugikan 02 nanti dikira dukung 02 dan seterusnya. Mangkanya KPU enggak mengupload itu tetapi memberikan penjelasan setiap ada yang salah

entry kami tampilkan ini yang sudah dibetulkan dan seterusnya, kemudian tuduhan ini kok enggak berubah–berubah gitu iya, kami memberikan jumlah akun yang sama kepada setiap Kabupaten, Kota,

Demon/Pengkas/Ppp/30:46-31:51

Tuturan nomor 6 termasuk dalam fungsi retorika sebagai penghubung kekuasaan tertinggi karena tuturan tersebut menjelaskan bahwa Arief Budiman selaku ketua KPU, KPU memberikan jumlah akun yang sama kepada setiap Kabupaten, Kota untuk mengentry data dan menguploadnya di KPU, karena KPU sebagai fungsi kekuasaan tertinggi yang menerima, mengupload data dan membetulkan data entry yang salah.

Berikut adalah data yang mengandung fungsi retorika sebagai penghubung kekuasaan tertinggi dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil youtube pada tanggal 25 April 2019 yang bertema Politik Pasca Pemilu.

7.(Arf)” No, itu tidak mungkin bagi saya, saya agak, agak risau begini iya, kalau kami dituduh curang, masak curang itu kami pertontonkan, kami curang iya kan enggak mungkin gitu loh, semua pihak siapa pun peserta pemilu, masyarakat bisa melihat sendiri dan kalau ada kesalahan silahkan dilaporkan, KPU membuka kanal untuk pelaporan itu baik email, by phone, by WA silahkan dilaporkan dan kami akan melakukan koreksinya.

Demon/Pengkas/Ppp/32:07-33:10

Tuturan nomor 7 termasuk dalam fungsi retorika sebagai penghubung kekuasaan tertinggi karena tuturan tersebut menjelaskan bahwa Arief Budiman selaku ketua KPU. KPU mengajak kepada semua pihak peserta pemilu serta masyarakat jika menemui kecurangan atau kesalahan silahkan laporkan kepada KPU, karena KPU adalah fungsi retorika penghubung kekuasaan tertinggi.

Berikut adalah data yang mengandung fungsi retorika sebagai penghubung kekuasaan tertinggi dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil youtube pada tanggal 02 Mei 2019 yang bertema Menunggu Hasil Pemilu.

18.(Ysf)” Kami tidak pernah mau menunggu keputusan akhir KPU tanggal 22, kami akan berjuang semaksimal mungkin agar KPU dapat meverifikasi data–data temuan dari kami, karena kalau sudah diputuskan tanggal 22 selesai, tamat harus ke MK.

Deli/Pengkes/Mhp/42:17-43:04

Tuturan nomor 18 termasuk dalam fungsi retorika sebagai penghubung kekuasaan tertinggi karena tuturan tersebut menjelaskan bahwa Yusuf Muhammad Martak selaku Koordinator GNPF Ulama ) (pendukung 02). Karena fungsi retorika sebagai penghubung kekuasaan tertinggi KPU adalah karena keputusan akhir untuk memutuskan pemenang hasil pemilu 2019, kemudian diputuskan oleh MK pada tanggal 22 Mei 2019.

Berikut adalah data yang mengandung fungsi retorika sebagai penghubung kekuasaan tertinggi dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil youtube pada tanggal 09 Mei 2019 yang bertema Menunggu Hasil Pemilu.

34.(Ysf)“Sudah, Tuan Guru Bajang, di daerah–daerah semua sudah disampaikan tetapi tidak ada respons, maka itu melalui BPN pusat, BPN kita minta agar segera menyampaikan kepada KPU pusat.

Demon/Pengkes/Mhp/15:56-16:08

Tuturan nomor 34 termasuk dalam fungsi retorika sebagai penghubung kekuasaan tertinggi karena tuturan tersebut menjelaskan bahwa Yusuf Muhammad Martak selaku Koordinator GNPF Ulama ) (pendukung 02). Karena BPN daerah-daerah sudah menyampaikan tetapi tidak ada respons, sehingga BPN pusat meminta segera menyampaikan kepada KPU pusat, sehingga fungsi retorika sebagai penghubung kekuasaan tertinggi adalah BPN pusat dan KPU pusat, karena BPN pusat dan KPU pusat memiliki kekuasaan yang tertinggi.

#### **4.3.3 Fungsi Retorika Sebagai Pengumpulan Data yang Akurat.**

Dalam pengumpulan data atau penyampaian pesan yang akan di sajikan, harus menemukan adanya bukti dan ke akuratan data agar tidak menimbulkan berita yang hoax atau menyebabkan ujaran kebencian seperti saat ini, karena adanya fakta atau bukti bisa membuktikan bahwa berita–berita terbaru tidak menimbulkan konflik dikemudian hari. Dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data atau penyampaian pesan yang akan ditampilkan harus sesuai dengan bukti, dan akurat agar tak menimbulkan berita ujaran kebencian dikemudian hari.

Berikut adalah contoh yang mengandung fungsi retorika Sebagai pengumpulan data yang akurat sebagai berikut:

12.(Arf)” Kalau bicara soal kepercayaan survey–survey yang kredibel masih menempatkan kepercayaan publik kepada KPU diangka 83%, publik masih percaya sama KPU.

Demon/Pengdat/Ppp/38:50-39:01

Berikut adalah data yang mengandung fungsi retorika sebagai pengumpulan data yang akurat dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil youtube pada tanggal 25 April 2019 yang bertema Politik Pasca Pemilu.

Tuturan nomor 12 termasuk dalam fungsi retorika sebagai pengumpulan data yang akurat karena tuturan tersebut menjelaskan bahwa Arief Budiman selaku ketua KPU mengatakan kepercayaan surevey-survey yang kredibel dan menempatkan kepercayaan publik kepada KPU masih sangat tinggi yaitu diangka 83% ini menegaskan bahwa fungsi retorika sebagai pengumpulan data yang akurat.

Berikut adalah data yang mengandung fungsi retorika sebagai pengumpulan data yang akurat dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil youtube pada tanggal 02 Mei 2019 yang bertema Menunggu Hasil Pemilu.

60.(Mqd)” Jadi kalau data yang tadi siang saya minta staf untuk rekapitulasi dari 34 Provinsi yang ada, kalau 2014, 33 Provinsi sekarang 34 Provinsi ya, itu provinsi dengan jumlah data masuk paling kecil itu kalau saya lihat disini adalah Papua 5, kemudian Papua Barat 18%. Mungkin ini yang kita ceritakan sedikit supaya pemirsa punya gambaran mengenai distribusi data yang sudah masuk iya, kemudian yang masih kecil juga adalah Jawa Timur 42% kemudian Jawa Barat 41%, yang sudah 100% satu–satunya adalah Bengkulu, yang mendekati 100% ada Sulawesi Tenggara 97, 7%, dan Gorontalo 97, 9%,tetapi banyak juga daerah–daerah yang sudah 80% maupun 70%.

Demon/Pengdat/Mhp/1:04:53-1:06:02

Tuturan nomor 60 termasuk dalam fungsi retorika sebagai pengumpulan data yang akurat karena tuturan tersebut menjelaskan bahwa M.Qodari selaku direktur eksekutif Indo Barometer mengatakan data yang tadi siang saya minta staf untuk rekapitulasi dari 34 Provinsi yang ada, kalau 2014, 33 Provinsi sekarang 34 Provinsi ya, itu provinsi dengan jumlah data masuk paling kecil itu kalau saya lihat disini adalah Papua 5, kemudian Papua Barat 18%, Jawa Timur 42% kemudian Jawa Barat 41%, yang sudah 100% satu–satunya adalah Bengkulu, yang mendekati 100% ada Sulawesi Tenggara 97, 7%, dan Gorontalo

97, 9%, tetapi banyak juga daerah–daerah yang sudah 80% maupun 70%. Ini menegaskan bahwa fungsi retorika sebagai pengumpulan data yang akurat. Berikut adalah data yang mengandung fungsi retorika sebagai pengumpulan data yang akurat dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil youtube pada tanggal 02 Mei 2019 yang bertema Menunggu Hasil Pemilu.

37.(Ysf)” Kalau sekarang yang korban begitu besar 320 sekian dan yang sakit 500 mungkin sudah 550 sekian, saya pikir ini kok belum pernah ada pemilu didunia yang korbannya sebesar ini gitu kan, kena apa gitu kan, ada apa, kalau bicara orang lembur, orang yang kerja dilapangan, orang yang kerja rekkening dan sebagainya, kerja lembur biasa, tapi tidak pernah ada yang seperti ini.

Demon/Pengdat/Mhp/19:17-19:47

Tuturan nomor 37 termasuk dalam fungsi retorika sebagai pengumpulan data yang akurat karena tuturan tersebut menjelaskan bahwa Yusuf Muhammad Martak selaku koordinator GNPF ulama kalau sekarang yang korban begitu besar 320 sekian dan yang sakit 500 mungkin sudah 550 sekian, ini menegaskan bahwa fungsi retorika sebagai pengumpulan data yang akurat.

#### **4.3.4 Fungsi retorika sebagai ilmu pengetahuan.**

Dengan di maksudnya retorika sebagai ilmu pengetahuan, bahwa untuk menarik perhatian seseorang atau masyarakat sangat di perlukan informatif dan pengetahuan, pengetahuan yang bisa di uji coba ke dalam masyarakat, karena masyarakat cenderung sebagian menolak dan menerima ajakan yang tidak berkenaan dan di anggap tidak menguntungkan bagi dirinya. Dapat disimpulkan bahwa fungsi retorika sebagai ilmu pengetahuan sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menguji ilmu pengetahuannya yang mereka terima, jika tak sesuai masyarakat akan menolak.

Berikut adalah contoh yang mengandung fungsi retorika Sebagai ilmu pengetahuan sebagai berikut:

35.(Ysf)“Ada sebagian yang mengakui, tetapi selalu argumentasi yang lebih banyak salah input, sampai kapan persiapan bertahun–tahun masih salah input tidak ada henti–hentinya, contoh sekarang pernahkah? ada fluktuasi yang signifikan? Tidak pernah selalu begini angka 01, 02 terus mau sampai kapan ini begini.

Demon/Ilpeng/Mhp/16:12-16:32

Berikut adalah data yang mengandung fungsi retorika sebagai ilmu pengetahuan dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil youtube pada tanggal 02 Mei 2019 yang bertema Menunggu Hasil Pemilu.

Tuturan nomor 35 termasuk dalam fungsi retorika sebagai pengumpulan data yang akurat karena tuturan tersebut menjelaskan bahwa Yusuf Muhammad Martak selaku koordinator GNPF ada sebagaimana mengakui, ada sebagaimana tidak mau mengakui dengan berargumentasi salah input, persiapan pemilu sudah bertahun-tahun tetapi masih salah input juga tanpa henti-henti, ini menengaskan bahwa fungsi retorika sebagai ilmu pengetahuan.

Berikut adalah data yang mengandung fungsi retorika sebagai ilmu pengetahuan dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil youtube pada tanggal 02 Mei 2019 yang bertema Menunggu Hasil Pemilu.

28.(Tgb)''Menurut saya perlu diklarifikasi iya antara misalnya yang paling banyak dibicarakan kan salah input, ternyata kedua belah pihak bermasalah artinya ada yang menuntungkan ini, ada yang menuntungkan itu, ada hal lain yang menyangkut indikasi kecurigaan, ketidak netralan aparat ya buktinya apa? kan semuanya pada akhirnya apa buktinya ?

Demon/Ilpeng/Mhp/12:27-12:51

Tuturan nomor 28 termasuk dalam fungsi retorika sebagai ilmu pengetahuan karena tuturan tersebut menjelaskan bahwa Tuan Guru Bajang selaku TKN pendukung 01 perlu diklarifikasi iya yang diresahkan selama ini adalah kesalahan menginput data sehingga seolah-olah pasangan presiden yang sepihak saja yang selalu diuntungkan, dan mengakibatkan adanya indikasi kecurangan dari pihak lawan, tetapi kalau kita teliti lagi ternyata yang bermasalah kedua belak pihak dari setiap calon pasangan presiden, dan untuk membuktikan kecurangan harus dengan bukti yang akurat supaya tidak menimbulkan perpecahan dan menimbulkan ujaran kebencian dari setiap pasangan calon presiden tersebut ini menegaskan bahwa fungsi retorika sebagai ilmu pengetahuan

Berikut adalah data yang mengandung fungsi retorika sebagai ilmu pengetahuan dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil youtube pada tanggal 02 Mei 2019 yang bertema Menunggu Hasil Pemilu.

6.(Ysf)'' Oh jadi Provinsi yang masuk disini terus 01 terus , ini pertanyaan gitu, jawab dulu aja, setau saya

kalau orang pernah ngikutin Pilpres berkali-kali itu pasti, zaman dulu ditayangkan di Borobudur pasti naiknya naik turun itu begini.

Foren/Ilpeng/Mhp/16:35-16;48

Tuturan nomor 6 termasuk dalam fungsi retorika sebagai pengumpulan data yang akurat karena tuturan tersebut menjelaskan bahwa Yusuf Muhammad Martak selaku koordinator GNPF zaman dahulu selalu posisi perhitungan suara yang masuk selalu naik dan turun dari setiap calon pasangan presiden, bukan hanya salah satu pihak saja yang merasa diuntungkan, pilpres dilakukan sudah berkali-kali dan selalu mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat relevan.

Berikut adalah data yang mengandung fungsi retorika sebagai ilmu pengetahuan dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil youtube pada tanggal 02 Mei 2019 yang bertema Menunggu Hasil Pemilu.

7.(Tgb)” Saya merasa bahwa memang kita ini kan karena ada dua calon, jadi polarisasinya kuat sekali dalam tanda kutip seperti kita berada masing-masing tempurung, kalau dalam tempurung itu yang kita teriakkan itu kan kembali ke kita, bahkan lebih besar lagi dengan responasinya. Kemudian kita membangun jejaring informasi yang juga kelompok kita juga, maka kemudian informasi yang sama itulah yang terdistribusi didalam kelompok kita, seakan-akan itulah kebenaran.

Deli/Ilpeng/Mhp/11:27-12:11

Tuturan nomor 7 termasuk dalam fungsi retorika sebagai pengumpulan data yang akurat karena tuturan tersebut menjelaskan bahwa Tuan Guru Bajang selaku TKN pendukung 01 bahwa pendukung dari dua calon tersebut yang berada di tempat-tempat posko kemenangan dengan jumlah responasi yang lebih besar dan membangun sekumpulan informasi yang kemudian kembali lagi ke masyarakat seolah informasi tersebut adalah kebenarannya meskipun belum tau kebenaran dari informasi tersebut.

#### **4.3.5 Fungsi retorika sebagai pondasi pembangun masyarakat.**

Retorika sering disebut atraktif, informasi, rekreatif, persuasif dengan tujuan menarik atau mengajak perhatian seseorang atau masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai umum, aspirasi masyarakat, dengan tujuan yang sama

untuk masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa retorika adalah bahasa yang digunakan seseorang untuk mementingkan nilai-nilai umum masyarakat bersama atau informasi, dan yang bersifat mengajak perhatian masyarakat untuk mengikuti keinginan kita.

Berikut adalah contoh yang mengandung fungsi retorika sebagai pondasi pembangun masyarakat sebagai berikut:

7.(Ysf)'' Tapi kan yang diutus bukan pak Jokowi, yang pertama di utus kan bukan pak Jokowi, kalau pak Jokowi dengan pak Prabowo itu sudah kenal lama dan tidak ada masalah, yang menjadikan 2x pak Jokowi jadi Gubernur dan jadi Presiden juga termasuk ada peranannya pak Prabowo, tapi jangan menyederhanakan masalah di saat terjadi proses terus mau terjadi seolah-olah rekonsiliasi sudahlah kalian terima begini-begini jangan, biar aja berproses, gak ada masalah kok, pasti kalau ketemu pasti gak ada masalah kok,

Foren/Ponpem/Mhp/35:33-36:01

Berikut adalah data yang mengandung fungsi retorika sebagai ilmu pengetahuan dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil youtube pada tanggal 02 Mei 2019 yang bertema Menunggu Hasil Pemilu.

Tuturan nomor 7 termasuk dalam fungsi retorika sebagai pondasi pembangun masyarakat karena tuturan tersebut menjelaskan Yusuf Muhammad Martak pak Jokowi dan pak Prabowo sudah saling mengenal lama, pak Prabowo sangat berjasa untuk menjadikan pak Jokowi sebagai Gubernur dan Presiden, sehingga jangan mudah menyimpulkan masalah disaat sedang proses memulihkan hubungan persahabatan antara pak Jokowi dan pak Prabowo untuk menerima hasil perhitungan suara yang sedang berproses ini, jika bertemu hubungan rekonsiliasi akan berjalan dengan baik dan tidak masalah.

Berikut adalah data yang mengandung fungsi retorika sebagai pondasi pembangun masyarakat dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil youtube pada tanggal 09 Mei 2019 yang bertema Pemilu Menelan Nyawa.

26. (Egl)''Ini persoalan kalau ada yang mengaku kecolongan pada konteks manajemen kepemiluan, wah anda mengakibatkan sekian ratus orang mati loh kalau berbicara begitu, mangkanya saya mengajurkan pada keluarga korban tuntutan, tuntutan bahwa nanti Effendy Gozali adalah salah satu orang yang

termasuk harus bertanggung jawab dan harus dipidana siap, jangan jadi pengecut

Deli/Ponpem/Pmn/1:46:06-1:46:31

Tuturan nomor 26 termasuk dalam fungsi retorika sebagai pondasi pembangun masyarakat karena tuturan tersebut menjelaskan Effendi Gozali konteks manajemen pemilu saat ini mengakibatkan ratusan orang mati, saya ingin keluarga korban menuntut dan saya ingin bertanggung jawab kalau harus dipidana saya siap, saya tidak akan menjadi pengecut ini menegaskan bahwa fungsi retorika sebagai pondasi pembangun masyarakat.

Berikut adalah data yang mengandung fungsi retorika sebagai pondasi pembangun masyarakat dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil youtube pada tanggal 02 Mei 2019 yang bertema Menunggu Hasil Pemilu.

61.(Ysf)” Saya alhamdulillah tidak melihat ulama pecah, walaupun ada indikasi-indikasi ke arah situ, tapi ulama tidak pecah seperti saya dengan Tuan Guru Bajang, walaupun berbeda tidak ada masalah, tidak ada itu hanya setting semuanya seolah-olah kita benturkan karena dinggap penentunya adalah Ulama saat ini, padahal enggak, masyarakat yang lain masih banyak yang ikut dalam pilpres dsb. Insya Allah tidak saya yakin tidak.

Demon/Ponpem/Mhp/1:14:26-1:14:51

Tuturan nomor 61 termasuk dalam fungsi retorika sebagai pondasi pembangun masyarakat karena tuturan tersebut menjelaskan Yusuf Muhammad Martak saya tidak melihat ulama pecah walaupun ada arah-arah kesana, tapi ulama seperti saya dan Tuan Guru Bajang meskipun berbeda pendapat tapi tidak masalah, meskipun ada setting seolah-olah kita diperkeruh dengan keadaan saat ini, padahal tidak ada masalah, sehingga mengakibatkan masyarakat banyak yang ikut pilpres ini menegaskan bahwa fungsi retorika pondasi pembangun masyarakat.

Berikut adalah data yang mengandung fungsi retorika sebagai pondasi pembangun masyarakat dalam acara Rosi Kompas TV yang diambil youtube pada tanggal 02 Mei 2019 yang bertema Menunggu Hasil Pemilu.

65.(Arf)” Saya fikir perlu menginformasikan kepada publik bagaimana proses rekap disetiap

Kecamatan, bukan hal yang mudah, bukan hal yang bisa cepat diselesaikan membutuhkan energi yang panjang, konsentrasi yang panjang, kekuatan fisik, mental ,jadi kita terus jaga bersama–sama iya, mereka menghadapi tekanan bukan hanya secara fisik, tapi mental itu juga harus dikuatkan oleh kita, supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan saya berdoa mudah–mudahan temen–temen di Kecamatan, di Kabupaten, di Kota, kemudian di Provinsi bahkan nanti tingkat nasional, semua tetap diberi kekuatan, kesehatan untuk menjalankan tugas ini tuntas sampai selesai. Demi bangsa dan negara.

Demon/Ponpem/Pmn/07:15-08:00

Tuturan nomor 65 termasuk dalam fungsi retorika sebagai pondasi pembangun masyarakat karena tuturan tersebut menjelaskan Arief Budiman menginformasikan kepada publik bagaimana proses rekap disetiap wilayah, bukan hal yang mudah, karena butuh waktu yang lama untuk menyelesaikannya dan butuh energi yang sangat kuat, konsentrasi yang kuat serta kekuatan fisik dan mental yang kuat sehingga kita menjaga masyarakat untuk menghadapi tekanan perhitungan suara bukan hanya dengan fisik, tetapi mental juga harus kita persiapkan supaya bisa menjalankan tugas dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara. ini menegaskan bahwa fungsi retorika pondasi pembangun masyarakat.